

**PERANAN SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN
KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN BLITAR PERIODE
2011 – 2015**

LAPORAN SKRIPSI

Oleh:
AHYA NASRULLOH ROZAK
NIM. 125080402111006



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**PERANAN SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN
KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN BLITAR PERIODE
2011 – 2015**

LAPORAN SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Perikanan di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
UniversitasBrawijaya**

**Oleh:
AHYA NASRULLOH ROZAK
NIM. 125080402111006**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

SKRIPSI

PERANAN SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN BLITAR PERIODE 2011 – 2015

Oleh:
AHYANASRULLOH ROZAK
NIM. 125080402111006

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 26 Oktober 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dosen Pembimbing II

Menyetujui,
Dosen Pembimbing I

MOCHAMMAD FATTAH, S.Pi, M.Si
NIK. 20150686 0513 1 001
Tanggal : 13 DEC 2018

Prof. Dr. Ir. MIMIT PRIMYASTANTO, MP
NIP. 19630511 198802 1 001
Tanggal : 13 DEC 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Perikanan Dan Kelautan



Dr. Ir. EDI SUSILO, MS
NIP. 19591205 198503 1 003
Tanggal : 13 DEC 2018



Judul : **PERANAN SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN BLITAR PERIODE 2011 - 2015**

Nama Mahasiswa : Ahya Nasrulloh Rozak

NIM : 125080402111006

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP

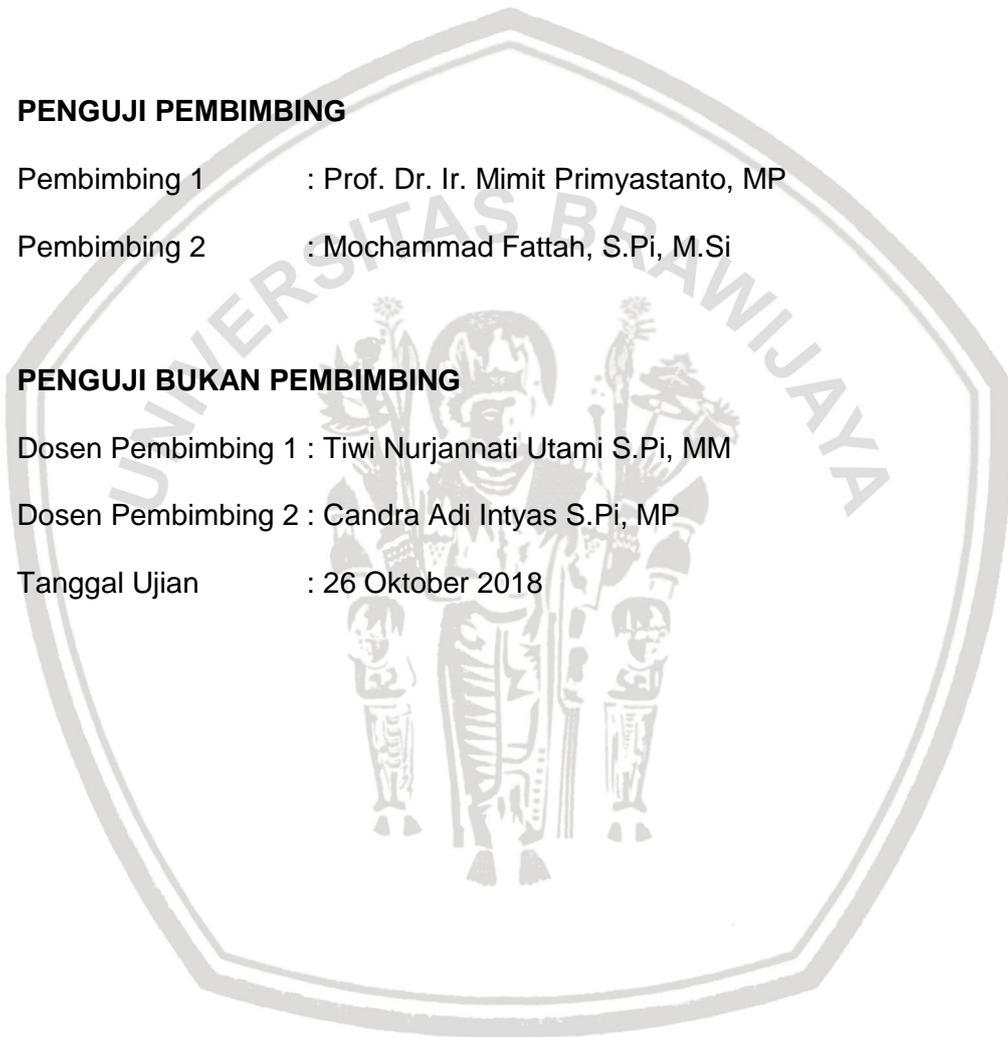
Pembimbing 2 : Mochammad Fattah, S.Pi, M.Si

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Pembimbing 1 : Tiwi Nurjannati Utami S.Pi, MM

Dosen Pembimbing 2 : Candra Adi Intyas S.Pi, MP

Tanggal Ujian : 26 Oktober 2018



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran penulis dalam menulis laporan penelitian ini. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluargaku tercinta yang telah memberi semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Bapak Mochammad Fattah, S.Pi , M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir Edi Susilo, MS, selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi S-1 Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan tambahan ilmu dan juga wacana kepada peneliti.
5. Teman-teman veteran seperjuangan angkatan 2012 yang selalu mengingatkan saya supaya cepat menyelesaikan studi saya.
6. Dan semua pihak, teman-teman yang telah membantu dan selalu memberikan suntikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wacana dan manfaat bagi peneliti selaku penyusun skripsi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 26 Oktober 2018

Peneliti,

Ahya Nasrulloh Rozak



RINGKASAN

Ahya Nasrulloh Rozak (125080402111006). Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Blitar Periode 2011 – 2015 (dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Moch. Fattah, S.Pi, M.Si)

Subsektor perikanan salah satu subsektor andalan pada sektor pertanian telah memperlihatkan kinerja yang memuaskan dan juga merupakan salah satu subsektor yang telah memberikan sumbangan terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di subsektor perikanan, dapat dilihat dari kontribusi subsektor perikanan dalam pembentukan PDRB kabupaten Blitar yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis peranan sektor perikanan dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Blitar, 2) Menganalisis pengaruh sektor perikanan dalam menunjang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blitar.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis kuantitatif, yang menggunakan peralatan statistik sederhana lalu dideskrifikan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1) Subsektor perikanan di Kabupaten Blitar memberikan manfaat yang besar dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar, terutama dalam memberikan kontribusinya terhadap sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan khususnya, maupun sektor ekonomi secara keseluruhan pada umumnya. Kontribusi subsektor perikanan terhadap keseluruhan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar didasarkan pada tabel PDRB Kabupaten Blitar atas dasar harga konstan tahun 2011-2015. Besarnya kontribusi subsektor perikanan terhadap 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu pengamatan yakni periode 2011- 2015, dimana yang menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah kontribusi subsektor perikanan sebesar 969.247,02 (juta Rp) sedangkan kontribusi 17 sektor ekonomi sebesar 20.925.474,26 (juta Rp), dengan persentase kontribusi 17 sektor ekonomi yang terserap oleh kontribusi subsektor perikanan menunjukkan angka sebesar 4,63%. Sedangkan untuk angka yang terendah terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kontribusi subsektor perikanan sebesar 651.833,60 (juta Rp) sedangkan kontribusi 17 sektor ekonomi sebesar 17.093.902,35 (juta Rp), dengan persentase kontribusi 17 sektor ekonomi yang terserap oleh kontribusi subsektor perikanan menunjukkan angka sebesar 3,81% , 2) Elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan di Kabupaten Blitar menunjukkan nilai terendahnya berada pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 0,008 dan nilai tertingginya berada pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 0,105 , dan rata rata dari nilai tersebut dapat dikatakan inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan sangat potensial untuk lebih ditumbuhkembangkan guna memacu peningkatan PDRB, disamping sebagai penyerap tenaga kerja yang memadai guna mengatasi masalah pengangguran.

Saran yang diberikan berupa saran akademis dan saran praktis, saran akademis berupa implikasi. Sedangkan saran praktis ditujukan kepada pemerintah, masyarakat dan dinas terkait. Saran bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang sesuai. Bagi dinas terkait agar mengadakan pelatihan pelatihan kepada masyarakat, karena masyarakat nantinya agar dapat melakukan pengolahan pasca panen.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Blitar Periode 2011-2015”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wacana dan manfaat bagi peneliti selaku penyusun skripsi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 26 Oktober 2018

Peneliti,

Ahya Nasrulloh Rozak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi	8
2.2 Pertumbuhan Regional	11
2.3 Produk Domestik Regional Bruto	12
2.4 Distribusi Pendapatan.....	18
2.5 Kesempatan Kerja	20
2.6 Kajian Empiris.....	27
2.7 Kerangka Konsepsional.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu Dan Tempat.....	32
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.2.1 Data Primer.....	32
3.2.2 Data Sekunder	33
3.2.1.1 Data Kuantitatif.....	33
3.2.1.2 Data Kualitatif	33
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Informasi Operasional	34
3.5 Metode Analisis.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Kondisi Geografis dan Penduduk.....	39
4.2 Gambaran Umum Subsektor Perikanan	41
4.2.1 Perkembangan dan Komposisi Produksi.....	41
4.2.2 Perkembangan dan Komposisi Luas Lahan	44
4.2.3 Perkembangan dan Komposisi Tenaga kerja	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan.....	47
5.2 Perkembangan dan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Perikanan Dengan Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi	50
5.3 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi.....	54
5.4 Elastisitas Kesempatan Kerja	67
5.5 Perkembangan Pendapatan Perkapita	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	48
2.	Persentase Tenaga Kerja Subsektor Perikanan Terhadap Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi Di Kabupaten Blitar, 2011-2015.....	52
3.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015	56
4.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011–2015 (Tanpa Subsektor Perikanan) 61	61
5.	Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi Kabupaten Blitar	65
6.	Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi Nasional 65	65
7.	Pertumbuhan Tenaga Kerja Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	68
8.	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015	70
9.	Elastisitas Kesempatan Kerja Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar, Tahun 2011-2015	72
10.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015	75
11.	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015	76

DAFTAR GRAFIK

No	Judul Gambar	Halaman
5.1	Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2015.....	48
5.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015.....	58
5.3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015.....	62



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
4.2.2	Perkembangan Dan Komposisi Luas Lahan	45



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Peta Lokasi Kabupaten Blitar.....	
2.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015 (Juta Rp) Termasuk Subsektor Perikanan	
3.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015 (Juta Rp) Tanpa Subsektor Perikanan	
4.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015 (%) Termasuk Subsektor Perikanan.....	
5.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015 (%) Tanpa Subsektor Perikanan	
6.	Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015	



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan suatu Negara tidak bisa lepas dari masalah perekonomian. Karena perekonomian suatu Negara merupakan salah satu kunci keberhasilan Negara tersebut. Dan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, maka suatu negara harus menentukan sumber sumber pendapatan Negara yang sesuai untuk diberikan di Negeranya.

Dalam hal ini, Islam memberikan wewenang pada Negara untuk mengatur dan mengelola sumber sumber pendapatan Negara demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan umum. Tentunya dalam hal ini tidak boleh lepas dari aturan aturan syari'at Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Dan juga dalam Al-qur'an disebutkan bahwa :

يَا أَيُّهَا كُلُّوَالنَّاسُ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۗ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ [٢:١٦٨]

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS Al Baqarah ayat 168 – 169)

Jadi menurut ayat diatas, pendapatan suatu Negara menurut Islam harus diperoleh dengan cara halal, dan semua sarana dalam hal mendapatkannya tidak boleh menggunakan cara yang haram.

Perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi kritis sebagai akibat dari krisis moneter yang dimulai pada pertengahan Juli 1997, hal tersebut seakan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat melihat kondisi fundamental perekonomian nasional. Di sisi lain kondisi ini seharusnya dapat memotivasi semua pihak agar sesegera mungkin mengatur langkah-langkah konkrit guna merestrukturisasi keadaan perekonomian yang dilanda kemelut berkepanjangan tersebut. Salah satu hal yang relevan dalam hal ini adalah dengan mengelola dan memberdayakan sektor-sektor andalan secara efektif guna memperoleh hasil yang optimal. Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor andalan yang berbasis ekonomi kerakyatan diupayakan untuk dapat bertahan dan tetap dapat memberikan kontribusi pada perekonomian yang sangat memprihatinkan tersebut.

Secara ekonomis, upaya untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Di samping kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, kemampuan menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan.

Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi

peningkatan PDRB, tapi pada kenyataannya, selama terjadinya krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional mengalami penurunan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 memperlihatkan bahwa sektor industri yang selama ini diharapkan menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu bertahan. Sementara untuk sektor pertanian yang kurang diperhatikan (diindikasikan dengan penurunan alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian) terbukti mampu menjadi katup pengaman dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian terbukti bahwa sektor pertanian mampu menghadapi gejolak ekonomi dan dalam menyerap tenaga kerja sehingga dapat berfungsi sebagai stabilisator dan katup pengaman perekonomian.

Sektor pertanian sebagai ciri masyarakat agraris telah membuktikan perannya dalam menghadapi situasi sulit berkenaan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan PDRB Blitar atas harga konstan 2010 untuk tahun 2015 masih menunjukkan angka yang positif yakni sebesar 4,67% pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada tahun 2014 yang hanya sebesar 3,00%. Pada tahun 2015 sumbangan sektor pertanian sebesar 36,38%, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,88%, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 12,83%, disusul sektor konstruksi sebesar 8,68%, selanjutnya sektor lain yang kontribusinya berkisar antara 3 - 4% yaitu sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, sektor pertambangan dan penggalan, dan sektor informasi

dan komunikasi, sementara itu ada juga sektor yang relatif masih kecil kontribusunya berkisar antara 0 - 1% yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kemudian sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa kesehatan dan jaminan sosial, sektor real estate, sektor transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya (Badan Pusat Statistik). Kontribusi sektor pertanian pada perekonomian tersebut pada hakekatnya merupakan akumulasi dari kontribusi-kontribusi subsektor tabama, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Kondisi tersebut seakan memberi peringatan pada pemerintah dan masyarakat pada umumnya agar lebih memfokuskan perhatian pada sektor pertanian.

Pembangunan pada sektor pertanian atau yang dikenal dengan sebutan “agro complex” mencakup kelima subsektor tersebut di atas, kiranya perlu untuk lebih dioptimalkan dan diberdayakan guna mendukung program pemerintah dalam usaha restrukturisasi perekonomian yang tengah dilanda kemelut melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi serta pengembangan teknologi pertanian tepat guna yang tentunya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam (lingkungan hidup) dan kehidupan masyarakat setempat.

Pengelolaan kelima subsektor pertanian tersebut yang umumnya memberikan kontribusi yang bervariasi pada sektor pertanian yang telah dilakukan di berbagai pelosok tanah air, tak terkecuali Jawa Timur yang telah memperlihatkan kontribusi yang positif melalui sektor pertanian pada pembentukan PDRB Jawa Timur atas harga berlaku sebesar 232.349,3

milyar rupiah pada tahun 2015 dan sebesar 209.538,8 milyar rupiah pada tahun 2014 dalam perekonomian nasional. Adapun kontribusi subsektornya pada PDRB Jawa Timur atas dasar harga berlaku untuk tahun 2014 tanaman pangan sebesar 67.828,4 miliar rupiah, tanaman hortikultura sebesar 18.430,6 miliar rupiah, perkebunan sebesar 32.961,9 miliar rupiah, peternakan sebesar 42.254,0 miliar rupiah, jasa pertanian dan perburuan 2.360,3 miliar rupiah, kehutanan sebesar 8.261,3 miliar rupiah dan perikanan sebesar 37.442,3 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 tanaman pangan sebesar 75.584,4 miliar rupiah, tanaman hortikultura sebesar 20.466,7 miliar rupiah, perkebunan sebesar 36.114,4 miliar rupiah, peternakan sebesar 46.242,2 miliar rupiah, jasa pertanian dan perburuan sebesar 2.739,9 miliar rupiah, kehutanan sebesar 9.301 miliar rupiah dan perikanan sebesar 41.899,8 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik).

Subsektor perikanan salah satu subsektor andalan pada sektor pertanian telah memperlihatkan kinerja yang memuaskan dan juga merupakan salah satu subsektor yang telah memberikan sumbangan terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di subsektor perikanan, dapat dilihat dari kontribusi subsektor perikanan dalam pembentukan PDRB kabupaten Blitar yang cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut membuktikan posisi strategis serta kontribusi kabupaten Blitar melalui sub sektor perikanan, terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blitar. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul dalam pembahasan skripsi ini :

“Peranan Subsektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Blitar Periode 2011-2015”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Seberapa besar kontribusi sektor perikanan dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Blitar.
2. Seberapa besar kontribusi sektor perikanan dalam menunjang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blitar.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Menganalisis peranan sektor perikanan dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis pengaruh sektor perikanan dalam menunjang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Blitar.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

1. Pemerintah

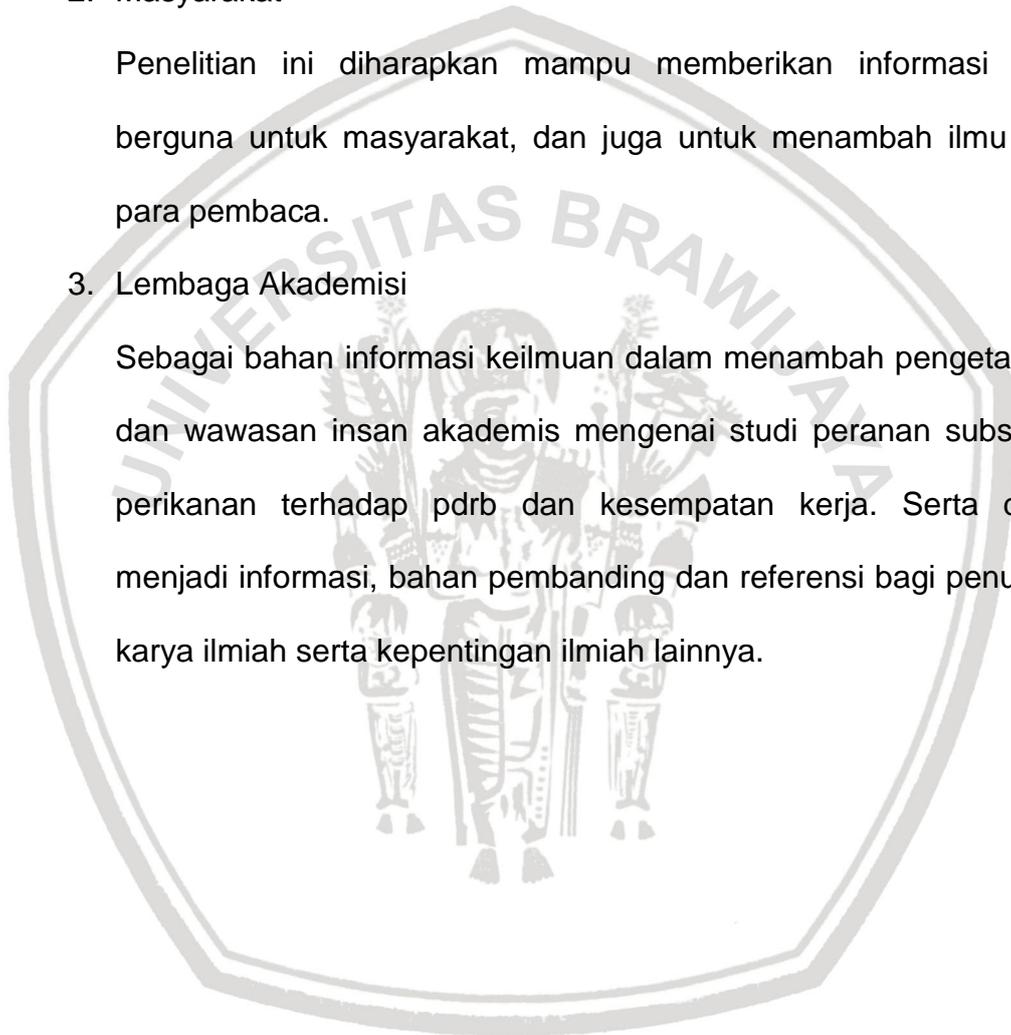
Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan di masa yang akan datang.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna untuk masyarakat, dan juga untuk menambah ilmu bagi para pembaca.

3. Lembaga Akademisi

Sebagai bahan informasi keilmuan dalam menambah pengetahuan dan wawasan insan akademis mengenai studi peranan subsektor perikanan terhadap pdrb dan kesempatan kerja. Serta dapat menjadi informasi, bahan perbandingan dan referensi bagi penulisan karya ilmiah serta kepentingan ilmiah lainnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang baru dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, hal ini disebabkan karena timbulnya kesadaran bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan untuk mengejar ketinggalan mereka khususnya dalam bidang ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan haruslah dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan karena pembangunan ekonomi adalah suatu hal yang esensial dari pembangunan.

Masalah pembangunan di negara sedang berkembang juga mendapat perhatian dari negara-negara maju. Hal ini dapat dilihat dari adanya usaha untuk memberikan bantuan-bantuan seperti pemberian bantuan teknik dan tenaga ahli serta bahan makanan dan bantuan untuk mengadakan penelitian proyek. Dengan adanya bantuan-bantuan dari negara maju tersebut secara tidak langsung dapat mempercepat proses pembangunan di negara-negara berkembang.

Rostow dalam Sukirno (1985) mengungkapkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat; yaitu perubahan dalam keadaan sistem politiknya, struktur sosialnya, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur

kegiatan ekonominya. Apabila perubahan-perubahan seperti itu timbul sehingga menyebabkan pertumbuhan lebih selalu berlaku, maka proses pertumbuhan ekonomi dapatlah dikatakan sudah mulai berlaku.

Istilah pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) sering digunakan secara bergantian, sehingga beberapa ahli ekonomi memberikan pengertian yang berbeda antara kedua istilah tersebut. Suparmoko (1979) misalnya, memberi pengertian bahwa ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada pembangunan ekonomi kalau tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan lebih banyak input dan lebih efisien yaitu adanya kenaikan output per satuan unit.

Selanjutnya oleh ahli-ahli ekonomi yang lain dalam Sukirno (1985) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai : (i) peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan PDB pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk, (ii) perkembangan PDB yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dan struktur ekonomi, yang pada umumnya masih bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDB, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak.

Sedangkan Soemitro Djoyohadikusumo (1994) memberikan definisi bahwa pembangunan ekonomi sebagai proses transformasi yang terjadi dalam perjalanan waktu yang ditandai oleh perubahan structural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Sehingga untuk mencapai pembangunan ekonomi diperlukan modernisasi kegiatan ekonomi agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Kemudian menurut Boediono dalam Tarigan (2007) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Berdasarkan pengertian tersebut, ada tiga aspek yang ditekankan oleh Boediono, yaitu ; (i) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu yang dilihat dari perkembangan atau perubahan output, (ii) pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan output perkapita, yaitu PDB dan jumlah penduduknya, (iii) pertumbuhan ekonomi berlaku dalam jangka panjang. Selanjutnya menurut Boediono, suatu keadaan dapat dikatakan menjadi pertumbuhan ekonomi apabila keadaan perekonomian tumbuh dalam jangka waktu yang cukup panjang, misalnya 10, 20 dan 50 tahun mengalami kenaikan output perkapita dan yang dimaksudkan dengan kenaikan output di sini adalah apabila terdapat kecenderungan output perkapita naik.

Pada umumnya para ahli ekonomi memberikan pengertian yang sama terhadap istilah tersebut. Mereka mengartikan perkembangan atau pertumbuhan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto dan pada penggunaan yang lebih umum, istilah pembangunan ekonomi biasanya dipakai untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara berkembang, sedangkan istilah pertumbuhan lebih tertuju pada situasi ekonomi negara maju.

2.2. Pertumbuhan Regional

Perbedaan pokok antara analisa pertumbuhan ekonomi nasional dan analisa pertumbuhan regional adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisa tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factor movements) . Seringkali kita dapat walaupun tidak seluruhnya mengansumsikan suatu bangsa sebagai suatu perekonomian tertutup. Asumsi ini tidak dapat diterapkan pada tingkat perekonomian regional. Adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal sangat memperbesar peluang bagi berbeda-bedanya tingkat pertumbuhan regional, bahkan kendatipun stok sumber-sumber nasional sudah tertentu. Karena dalam analisa dinamika sebenarnya, stok ini akan semakin bertambah besar, maka tingkat pertumbuhan suatu daerah dapat jauh lebih tinggi daripada tingkat normal yang dicapai oleh perekonomian nasional atau dalam keadaan ekstrim lainnya menjadi negatif. Tingkat pertumbuhan output total yang negatif adalah suatu hal yang sangat jarang terjadi dalam perekonomian nasional yang sudah maju. Akan tetapi menurut Richardson dalam Sihotang (2001), hal tersebut

disebabkan arus sumber-sumber dapat menyeimbangkan, maka hal itu tidak berarti bahwa perbedaan-perbedaan pertumbuhan regional pasti menjadi lebih besar daripada tingkat pertumbuhan nasional.

Pada umumnya pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi keduanya. Penentu-penentu penting yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat permintaan daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto, dalam hal ini bertambahnya produksi barang dan jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto. Nilai yang tercantum dalam Produk Domestik Regional Bruto tersebut mencerminkan taraf hidup dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat.

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistis. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya didefinisikan oleh Boediono (1985) yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Di sini jelas ada sisi yang perlu diperhatikan,

yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi proses kenaikan output perkapita tidak bisa dan tidak harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak. Suatu teori ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk.

Dari definisi tersebut, maka dalam konsep ekonomi regional harus dilihat batasan Produk Domestik Regional Bruto. Hanya saja perlu dipahami bahwa perekonomian regional berada pada posisi yang lebih terbuka dibanding dengan perekonomian nasional.

Seperti halnya Produk Domestik Bruto (PDB), maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari produksi seluruh sektor perekonomian regional yang pada saat ini mengacu pada tahun dasar 2010 dan dijabarkan dalam 17 sektor. Berbeda dengan tahun dasar 2000, dengan jumlah sektor lebih sedikit, yaitu 9 sektor. Perubahan tahun dasar untuk perhitungan PDB harga konstan dilakukan secara periodik (1960, 1973, 1983, 1993, 2000 dan 2010).

Pada tahun dasar 2000, PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi sesuai dengan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan

4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Sektor Konstruksi
6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa

Pada tahun dasar 2010, PDB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam dalam 17 lapangan usaha sesuai dengan KBLI 2009 dan KBKI 2010 sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajib

15. Jasa Pendidikan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya

17. Jasa Lainnya

Ada beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan secara menyeluruh di semua daerah di Indonesia, seperti yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (1979) antara lain : (i) Produk Domestik Regional Bruto adalah seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik regional tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksi tersebut berasal atau dimiliki oleh penduduk domestik regional tersebut atau tidak. Konsep perhitungan PDRB dalam satu tahun tertentu dapat menggunakan tiga konsep atau cara perhitungan, yaitu dari: *segi produksi*, adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu daerah / regional dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun, *segi pendapatan*, adalah jumlah nilai produksi dalam suatu perekonomian regional diperoleh dari penjumlahan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan dari tenaga kerja, modal, harta tetap (tanah dan bangunan) yang disalurkan dan keahlian perusahaan dan *segi pengeluaran*, adalah jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta yang mencari keuntungan, pembentukan modal tetap bruto, ekspor netto dan perubahan stok dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. (ii) Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran berdasarkan harga pada tahun dasar. Cara perhitungan atas dasar harga konstan ini telah menghilangkan pengaruh harga atau inflasi, sehingga dikatakan menunjukkan nilai riil (nyata), (iii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha sektor yang meliputi balas jasa faktor produksi (upah, gaji dan surplus usaha), penyusutan dan pajak tak langsung netto, (iv) Produk Regional Bruto adalah PDRB ditambah dengan pendapatan netto dari luar daerah, (v) Produk Regional Netto adalah PDRB dikurangi penyusutan barang-barang modal, (vi) Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi adalah Produk Regional Netto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung netto. Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi merupakan pendapatan regional, (vii) Pendapatan Perkapita adalah Produk Regional Netto atas dasar biaya faktor produksi dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun, (viii) Pajak Tak Langsung Netto adalah pajak tak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen.

Dari berbagai defenisi dan konsep di atas dapat dikatakan bahwa peningkatan PDRB adalah merupakan salah satu cerminan pokok keberhasilan usaha pembangunan regional. Suatu perekonomian regional dikatakan mengalami pertumbuhan dan berkembang apabila tingkat ekonomi lebih tinggi dari yang dicapai pada masa sebelumnya, di mana nilai PDRB dari tahun ke tahun bebas dari pengaruh harga. Hal ini dapat

dilakukan dengan menghitung PDRB berdasarkan harga konstan. Oleh karena itu, pengertian PDRB dibedakan atas dua bagian, yakni PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan PDRB atas harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Laju pertumbuhan ekonomi regional dari tahun ke tahun yang didasarkan pada PDRB atas harga berlaku disebut pertumbuhan PDRB nominal, sedangkan PDRB atas harga konstan disebut sebagai pertumbuhan PDRB nyata/riil. Perekonomian regional yang tidak mengalami peningkatan PDRB riil, dapat dikatakan bahwa perekonomian regionalnya berada pada keadaan resesi, yaitu apabila penurunan tidak seberapa, akan tetapi apabila PDRB riilnya cukup besar, maka gejala ekonomi regional tersebut biasa disebut depresi. Penurunan PDRB riil tidak terjadi apabila tingkat pertumbuhan PDRB nominal lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga. Oleh karena itu untuk mewujudkan kenaikan PDRB riil diperlukan peningkatan PDRB nominal yang lebih tinggi daripada inflasi.

Selanjutnya, untuk menentukan PDRB nyata perkapita yang merupakan pendapatan rata-rata penduduk tingkat regional pada suatu tahun tertentu, maka yang harus dilakukan adalah membagi PDRB riil pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

2.4. Distribusi Pendapatan

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada sektor industri yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, sebelumnya telah mendapatkan kritikan tajam dari banyak pihak berhubung pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka menggemblak tersebut telah mengakibatkan ketimpangan yang semakin sebesar dalam distribusi pendapatan.

Menurut Todaro (2003), Pemerataan yang lebih adil di Negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu Negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, lanjut Todaro (2006), ketimpangan harus mendapat perhatian karena ketimpangan suatu wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, alokasi asset yang tidak efisien dan menambah jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Arsyad (1997), ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita

2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga harga barang hasil industri untuk melindungi usaha usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan Negara Negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan Negara Negara maju terhadap barang barang ekspor NSB
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain lain.

Salah satu cara yang biasa dipakai dalam menggambarkan pemerataan pendapatan adalah Kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk dan persentase jumlah pendapatan nasional yang diterima, biasanya satu tahun. Dalam menentukan keadaan distribusi pendapatan perlu diterapkan lebih dahulu tolak ukur berdasarkan

pertimbangan tertentu. Oleh Bank Dunia masyarakat dibagi atas 3 kelompok yaitu masing-masing 40% penduduk dengan pendapatan terendah, 40% penduduk dengan pendapatan sedang, dan 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi. Bank Dunia mengasumsikan penyebab ketidakmerataan pendapatan adalah karena kelompok penduduk dengan pendapatan terendah menerima pendapatan yang sangat kecil, sehingga diterapkan kriteria sebagai berikut tingkat ketidakmerataan tinggi bila 40% penduduk kelompok bawah menerima jumlah pendapatan lebih kecil dari 12% pendapatan nasional, sedangkan jika mereka menerima antara 12% - 17% di kategorikan tingkat ketidakmerataan rendah (Siagian, 1989).

Mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan biasanya dihitung dengan memakai Koefisien Gini, sehingga sering muncul pertanyaan bagaimana menentukan besarnya Koefisien Gini tersebut. Dalam menentukan besarnya Koefisien Gini yang dapat diterima ditempuh dengan cara berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, membandingkan Koefisien Gini di negara-negara lain dan membandingkan data pengeluaran.

2.5. Kesempatan Kerja

Penduduk terbagi menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja(15-64 tahun) dan bukan angkatan kerja(< 15 tahun dan > 65 tahun). Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang bukan

angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi (BPS, 2017). Golongan yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga dalam kelompok bukan angkatan kerja ini, sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar kerja. Oleh sebab itu, kelompok ini dapat juga disebut sebagai angkatan kerja potensial.

Pertumbuhan penduduk yang pesat akan berakibat pada meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang akan berimplikasi pada penyediaan kesempatan kerja. Jika jumlah tenaga kerja khususnya angkatan kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran. Begitupun sebaliknya, jika jumlah angkatan kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka jumlah pengangguran akan berkurang. Sehingga dapat dikatakan kesempatan kerja merupakan banyaknya lowongan kerja yang tersedia di berbagai sektor ekonomi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana pendapat Simanjuntak (1998) yang menyatakan bahwa kesempatan kerja merupakan lapangan pekerjaan dan lowongan kerja yang tercipta untuk diisi melalui suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lowongan pekerjaan yang belum diisi.

Teori klasik, mengungkapkan bahwa bila harga tenaga kerja yaitu upah fleksibel maka akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Artinya tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran suka rela. Pada tingkat upah riil yang berlaku di pasar

tenaga kerja, semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka inilah pengangguran sukarela.

Teori Keynes, mengungkapkan bahwa pasar tenaga kerja hampir mirip dengan Klasik tetapi terdapat dua hal yang membedakannya yaitu pertama, upah nominal dapat naik tetapi tidak dapat turun, hal ini karena berlakunya upah minimum. Kedua, upah nominal mungkin fleksibel tetapi tidak sefleksibel dalam model Klasik, jika upah nominal dapat turun sempurna maka akan diikuti dengan penurunan harga.

Teori Lewis, mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis, sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi penguasa di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran akan pekerja di sektor subsisten terbelakang akan

diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan atau ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja di sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

Teori Fei Ranis, mengemukakan tentang ciri-ciri negara berkembang sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alam belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei Ranis, ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, di mana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap di mana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ini ditandai dengan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian yang menghasilkan output yang lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja akan terserap ke

sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan penambahan output dan perluasan usahanya.

Kesempatan kerja menurut Swasono dan Sulistyarningsih (1993) memberi pengertian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong (*vacancy*). Kemudian menurut Soeroto (1992) persoalan kesempatan kerja berawal dari tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah jumlah keseluruhan penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan.

Dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan yang masih lowong tersebut (yang berarti adanya kesempatan) timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang secara riil diperlukan untuk perusahaan atau lembaga penerima kerja pada posisi, tingkat upah dan syarat kerja tertentu, melalui advertensi lain-lain, kemudian dinamakan lowongan.

Menurut Malayu Hasibuan (2001) usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara (i) memperluas modal yang diinvestasikan baik kepada sektor pertanian maupun sektor industri, (ii) memperpanjang proses produksi sehingga produksi yang dihasilkan menjadi barang-barang setengah jadi atau barang jadi, ini berarti harus

mendirikan beraneka macam pabrik yang akan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, (iii) memberikan bimbingan latihan-latihan dan bantuan modal, pemasaran kepada home industri supaya berkembang dan lapangan kerja semakin banyak, (iv) menciptakan situasi dan memberikan dorongan kepada tenaga ahli atau terampil supaya mereka jangan hanya mencari pekerjaan tetapi hendaknya mereka itu pencipta pekerjaan dengan jalan berwiraswasta.

Besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Fungsi permintaan ini biasanya didasarkan kepada teori Neo-Klasik mengenai *Marginal Physical Product Of Labor*. Berlawanan dengan fungsi penyediaan tenaga kerja, maka permintaan terhadap tenaga kerja berkurang bila tingkat upah menaik.

Adapun elastisitas kesempatan kerja, menurut Payaman Simanjuntak didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan besarnya elastisitas tersebut tergantung pada : (i) kemungkinan substitusi tenaga kerja kepada faktor produksi yang lain, (ii) elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, (iii) proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi dan (iv) elastisitas persediaan faktor pelengkap lainnya.

Menurut Simanjuntak (2001) faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yaitu:

- A. kondisi perekonomian, dimana pesatnya roda perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi, kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru.
- B. pertumbuhan penduduk ; kualitas pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu semakin tinggi jumlah penduduk akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja.
- C. produktivitas/kualitas sumber daya manusia; tingginya produktivitas dan kualitas sumber daya seseorang akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja, dan sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.
- D. tingkat upah; kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya, hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja.
- E. struktur umur penduduk; semakin besar struktur umur penduduk yang digolongkan mudah (usia <15 tahun), maka kesempatan kerja akan menurun dan sebaliknya.

2.6. Kajian Empiris

Febryana Risqi (2016), membahas tentang *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010 – 2014*, menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2010 – 2014. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variable PDRB adalah sebesar 0,275939 dengan nilai *probability* sebesar 0,0005. Koefisien regresi variable tingkat upah sebesar 0,275939 juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB akan cenderung diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,27% , *ceteris paribus*.

Indra Oloan (2009), membahas tentang *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*, menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif sebesar 76,38% dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan hipotesis.

Dio Syahrulloh (2014), membahas tentang *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009 – 2012*, menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan tingkat keyakinan 95 persen, hal ini ditandai dengan nilai probabilitas (0,0102). Dengan nilai koefisien negatif (-0,552266) yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persen pada PDRB, maka kemiskinan

akan turun sebesar 0,552266 persen dengan asumsi variable lain tetap, atau ringkasnya apabila PDRB meningkat maka kemiskinan akan menurun.

Juni Efendi (2014), membahas tentang *Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Antar Sektor di Pulau Sumatera Tahun 2014*, menyimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Pulau Sumatera (0,17%) dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi di Provinsi Bangka Belitung (6,61%) dan terendah di Provinsi Bengkulu (2,24%). Pertumbuhan rata-rata sektor perdagangan, hotel dan restoran di Pulau Sumatera (6,47%) dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi Provinsi Kepulauan Riau (11,79%) dan terendah Provinsi Sumatera Utara (3,35%). Untuk pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Pulau Sumatera (4,57%) dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi Provinsi Jambi (5,96%) dan terendah Provinsi Lampung (3,55%). Pertumbuhan PDRB rata-rata sektor perdagangan hotel dan restoran (7,36%) dengan pertumbuhan tertinggi Provinsi Riau (10,90%) dan terendah Provinsi Aceh (2,56%). Sedangkan untuk elastisitas rata-rata tenaga kerja sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran samasama bersifat tidak elastis $E < 1$. Elastisitas rata-rata tenaga kerja sektor pertanian (0,08) dengan elastisitas tertinggi Provinsi Lampung (1,27) dan terendah Provinsi Bengkulu (- 0,44). Elastisitas rata-rata tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,96) dengan elastisitas rata-rata tertinggi Provinsi Riau (38,16) dan yang terendah Provinsi Sumatera Utara (0,52).

2.7. Kerangka Konseptual

Pembangunan nasional yang di arahkan pada pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan pendapatan masyarakat guna peningkatan taraf hidup masyarakat telah dilaksanakan selama kurun waktu 30 tahun. Di mulai dengan kebijakan untuk merubah struktur ekonomi, yang memfokuskan pada pembangunan sektor industri. Pembangunan pada sektor industri diharapkan membawa perubahan-perubahan sehingga memperkecil sektor pertanian, jika dibandingkan dengan peranan sektor industri yang dijadikan tulang punggung (leading sektor) perekonomian Indonesia.

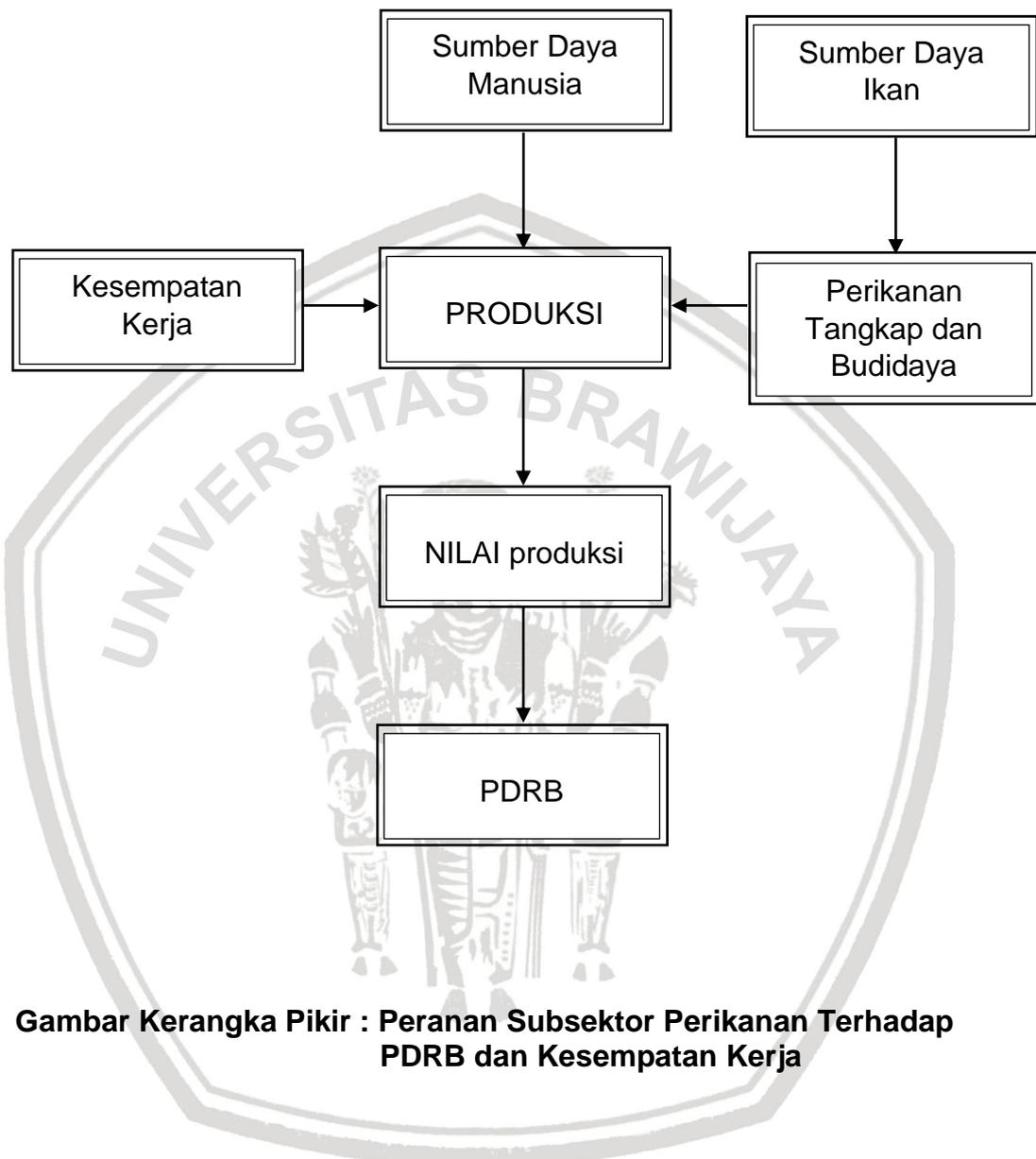
Arah kebijakan pada sektor industri memberi pengaruh yang besar terhadap sektor pertanian. Pengaruhnya dapat dilihat dari kesenjangan yang ditimbulkan oleh kebijakan yang ditempuh tersebut, utamanya yang berhubungan dengan pengembangan regional atau daerah yang umumnya berbasis pertanian. Kondisi tersebut mencapai klimaksnya pada akhir 90-an, yang dimulai dengan terpaan badai krisis moneter dan akhirnya menjadi krisis ekonomi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa ketahanan ekonomi yang selama ini dijadikan kebanggaan, merupakan hal yang rapuh. Sektor industri yang tadinya dijadikan tulang punggung perekonomian ternyata tidak mampu membendung badai krisis ekonomi yang melanda. Di sisi lain sektor pertanian ternyata memperlihatkan ketahanannya dalam menghadapi krisis yang tengah terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari kemampuannya untuk tetap dapat menghasilkan devisa dari ekspor hasil-hasil pertanian.

Krisis ekonomi telah menjadikan perekonomian Indonesia yang tadinya diarahkan pada pembangunan sektor industri dengan tujuan memperkecil peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDB menjadi hal yang sangat riskan. Perekonomian nasional yang diarahkan pada industri yang dapat menunjang pembangunan sektor pertanian sehingga pengelolaan di sektor pertanian yang berbasis industri dapat memperoleh hasil yang lebih optimal. Berdasarkan kenyataan bahwa ketahanan ekonomi di sektor pertanian relatif mantap, maka pembangunan disektor ini dapat dijadikan sebagai langkah awal guna keluar dari krisis berkepanjangan yang tengah melanda perekonomian Indonesia.

Pembangunan regional/daerah sebagai basis utama tumbuh kembangnya industri hasil-hasil pertanian seharusnya ditempatkan pada prioritas utama, karena diharapkan akan menjadi tumpuan masyarakat daerah dalam penyerapan tenaga kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat, juga diharapkan akan merangsang pertumbuhan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan output dan pendapatan regional.

Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah penghasil produk dalam sektor pertanian, utamanya melalui subsektor perikanan perlu kiranya mendapatkan perhatian sehubungan dengan pembangunan regional/daerah guna mengoptimalkan produksi perikanannya. Pengelolaan subsektor perikanan di Kabupaten Blitar tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar seiring dengan peningkatan daya serap tenaga kerja yang berhubungan erat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Blitar.

Secara sistematis kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada diagram alur berikut ini:



Gambar Kerangka Pikir : Peranan Subsektor Perikanan Terhadap PDRB dan Kesempatan Kerja

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 bertempat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ditentukan, dengan pertimbangan Kabupaten Blitar memiliki potensi perikanan yang cukup besar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data berdasarkan sumber data yang digunakan dalam Skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner (Dharma, 2008).

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Blitar. Adapun data primer yang diperoleh yaitu, Problematika mengenai produksi perikanan yang ada di Kabupaten blitar

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Pada penelitian ini jenis data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan, Dinas Perikanan dan Kelautan yang meliputi:

- Jumlah produksi yang dihasilkan
- Jumlah tenaga kerja yang diserap
- Data PDRB Kabupaten Blitar

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

3.2.2.1 Data Kuantitatif

Data ini diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan dan Kelautan yang meliputi: data mengenai jumlah produksi yang dihasilkan, jumlah tenaga kerja yang diserap dan data PDRB Kabupaten Blitar.

3.2.2.2 Data Kualitatif

Data ini diperoleh dari buku-buku acuan yang bersumber dari studi kepustakaan dan artikel-artikel yang berguna bagi terlaksana penulisan ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan realistis. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode studi

kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Blitar.

1. Penelitian Kepustakaan

Library research adalah penelitian yang diadakan pada perpustakaan dengan tujuan mendapatkan keterangan berupa teori-teori, yang bersumber dari buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas.

2. Penelitian Lapangan

Field research adalah penelitian yang dilakukan pada daerah yang menjadi objek penelitian dan pada instansi terkait yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Adapun data yang didapat pada penelitian lapang ini yaitu:

- Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan
- Jumlah tenaga kerja yang diserap
- Data PDRB Kabupaten Blitar

3.3 Informasi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa batasan variabel yakni :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar atas harga konstan 2010. Pengertian PDRB dalam hal ini adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi

dalam suatu wilayah/daerah, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

2. Pertumbuhan output adalah proses peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah, dimana peningkatan tersebut diukur dari tahun ke tahun.
3. Pendapatan perkapita adalah total dari keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (total PDRB) dibagi jumlah penduduk daerah tersebut.
4. Kesempatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja pada suatu wilayah/daerah atau penggunaan tenaga kerja pada setiap sektor lapangan usaha.
5. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan PDRB.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yang menggunakan peralatan statistik sederhana lalu didesriptifkan, dengan perhitungan:

1. Pertumbuhan produksi, yakni dengan membandingkan jumlah produksi (output) yang dihasilkan dari tahun ke tahun selama periode pengamatan, kemudian menghitung persentase kenaikannya dengan rumus seperti yang dikutip Suseno (1990) sebagai berikut :

$$PO = \frac{PO_{\chi} - PO_{\chi-1}}{PO_{\chi-1}} \times 100\%$$

Dimana : PO = Persentase Pertumbuhan Produksi
 PO_x = Produksi Tahun (X)
 PO_{x-1} = Produksi Tahun Sebelumnya

2. Jumlah tenaga kerja yang diserap, yakni dengan menghitung persentase tenaga kerja sektor perikanan terhadap tenaga kerja sektor ekonomi secara keseluruhan (17 sektor) yang ada di Kabupaten Blitar, dengan rumus :

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%(1)$$

Dimana : P = Persentase Tenaga Kerja Sektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi di Kabupaten Blitar
 X = Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perikanan
 Y = Jumlah Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi

3. Kontribusi dalam pembentukan PDRB, yaitu dengan menggunakan rumus yang dikutip dari Suseno (1990), yakni menghitung berapa besar kontribusi subsektor perikanan terhadap kontribusi sektor ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Blitar, dengan rumus :

$$K_{ssp} = \frac{VA_{ssp}(Rp)}{VA_{ss}(Rp)} \times 100\%$$

Dimana : Kssp = Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi di Kabupaten Blitar
 VAssp = Nilai PDRB Sektor Perikanan di Kabupaten Blitar
 VAss = Nilai PDRB 17 Sektor Ekonomi di Kabupaten Blitar

4. Elastisitas kesempatan kerja dan subsektor perikanan, yang diperoleh melalui; membagi persentase (%) pertumbuhan pekerja subsektor perikanan dengan persentase (%) pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Blitar, dengan rumus :

$$Ekk_{ssp} = \frac{\text{Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja}_{ssp}(t)}{\text{Laju Pertumbuhan PDRB}_{ssp}(t)}$$

Dimana :

Ekk = Elastisitas Kesempatan Kerja Sektor Perikanan Kabupaten Blitar
 (t) = Persentase Kebutuhan Pekerja Sektor Perikanan Kabupaten Blitar
 (t) = Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan Kabupaten Blitar

5. Pendapatan perkapita, diperoleh melalui : membagi total dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor ekonomi secara keseluruhan (17 sektor) dengan jumlah penduduk, kemudian dihitung tingkat kenaikan pendapatan perkapitanya, dengan rumus yang dikutip dari Suseno (1990), sebagai berikut :

$$IP = \frac{IP_{\gamma} - IP_{\gamma-1}}{IP_{\gamma-1}} \times 100\%$$

Dimana : IP = Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
IP_x = Pendapatan Perkapita Tahun
IP_{x-1} = Pendapatan Perkapita Pada Tahun
Sebelumnya



IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis dan Penduduk

Kabupaten Blitar adalah salah satu dari 38 daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur. Wilayah daerah tingkat II Blitar berada di pesisir selatan Jawa Timur. Daerah ini berada di persimpangan lalu lintas perekonomian daerah Jawa Timur bagian tengah dan bagian selatan. Sebagai salah satu daerah lalu lintas perekonomian Kabupaten Blitar yang terletak di bagian tengah Propinsi Jawa Timur, yang secara astronomis terletak antara $111^{\circ}40'$ - $112^{\circ}10'$ BT dan $7^{\circ}58'$ - $8^{\circ}9'51''$ LS, sedangkan secara geografis terletak di Pulau Jawa bagian timur dan berada di pesisir Samudra Hindia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588,79 km² dimana sekitar 38,02 persen merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Wilayah administratif Kabupaten Blitar terbagi dalam 22 kecamatan, terdiri dari 248 desa/kelurahan yaitu, 28 kelurahan dan 220 desa. Pemekaran wilayah kecamatan ini dimulai pada tahun 1992, sedangkan sebelum tahun tersebut Kabupaten Blitar hanya terdiri atas 19 kecamatan. Kondisi Topografi Kabupaten Blitar

adalah daerah dengan ketinggian rata-rata \pm 243 meter diatas permukaan laut dengan distribusi wilayah menurut ketinggian, yaitu:

- 36,4% wilayah kecamatan berada pada ketinggian antara 100 - < 200 meter dpl.
- 36,4% wilayah kecamatan berada pada ketinggian antara 200 - < 300 meter dpl.
- 27,2% wilayah kecamatan berada pada ketinggian > 300 meter dpl

Terdapat enam kecamatan yang wilayahnya berada pada ketinggian >300 meter diatas permukaan laut, yaitu: Kecamatan Wates, Wonotirto, Doko, Gandusari, Nglegok, dan Panggungrejo. Keberadaan Sungai Brantas membagi wilayah Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian, yaitu wilayah Kabupaten Blitar bagian Utara dan wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan.

Bagian utara Kabupaten Blitar merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 105 – 349 meter dari permukaan laut. Wilayah ini secara geografis dekat dengan Gunung Kelud yang masih aktif sehingga tanah di wilayah ini lebih subur dibanding dengan bagian Selatan. Kabupaten Blitar bagian utara ini meliputi 15 wilayah kecamatan, yaitu: Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu.

Bagian Selatan Kabupaten Blitar merupakan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian antara 150-420

meter dari permukaan laut. Dari segi topografi, bagian selatan merupakan bagian pesisir dan pegunungan berbatu, sehingga struktur tanahnya kurang subur dibandingkan dengan Blitar bagian utara. Bagian utara ini mencakup 7 wilayah kecamatan yaitu: Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan, dan Kademangan

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar dalam periode lima tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sebesar 0,45%. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan registrasi penduduk dimana pada tahun 2011 berjumlah 1.124.775 jiwa dan menjadi 1.145.396 jiwa pada akhir tahun 2015 yang tersebar di 22 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Ponggok yakni sebanyak 100.303 jiwa, sedangkan Kecamatan Bakung dengan penduduknya sebanyak 25.463 jiwa yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil. Mata pencarian penduduk sebagian besar adalah petani dan nelayan atau petambak, disamping itu ada juga yang menjadi pegawai negeri, peternak, pedagang dan lain-lain.

4.2 Gambaran Umum Subsektor Perikanan

4.2.1 Perkembangan dan Komposisi Produksi

Produksi subsektor perikanan Kabupaten Blitar menurut jenis yang dihasilkan terbagi atas dua sektor yaitu sektor perikanan tangkap dan sektor perikanan budidaya, dimana selama periode 2011-2015 terlihat bahwa pada sektor perikanan tangkap menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami penurunan

produksi. Pada tahun 2011 produksi perikanan tangkap yakni 1.276,60 ton. Pada tahun 2012 produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yakni 1.516 ton. Pada tahun 2013 produksi perikanan tangkap kembali menunjukkan peningkatan yakni 1.797,60 ton. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan menjadi 1.314,5 ton. Pada tahun 2015 produksi perikanan tangkap kembali mengalami peningkatan yakni 2.226,45 ton. pada sektor perikanan tangkap laut dan darat ada dua jenis komoditi yakni ikan dan udang. Pada kurun waktu 2014 – 2015, perkembangan komoditas ikan untuk perikanan tangkap tampak mendominasi produksi untuk sektor laut maupun darat, dengan produksi sebesar 1.053,70 ton untuk sektor laut dan 247,84 ton untuk sektor darat pada tahun 2014, dimana komoditas udang yang sama hanya menghasilkan produksi sebesar 9,92 ton untuk sektor laut dan 3,11 ton untuk sektor darat, sehingga jumlah produksi untuk tahun yang sama sebesar 11.063,6 ton untuk sektor laut, dan 250,94 ton untuk sektor darat. Pada tahun 2015 komoditas ikan dengan produksi sebesar 1.941,32 ton untuk sektor laut dan 276,95 ton untuk sektor darat, dan untuk komoditas udang dengan produksi sebesar 3,63 ton untuk sektor laut dan 4,54 untuk sektor darat, sehingga jumlah produksi sebesar 1.945 ton untuk sektor laut dan 281,49 ton untuk sektor darat.

Pada sektor perikanan budidaya juga hampir selalu menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2012 yang mengalami penurunan produks sebesar 0,5 ton, yang pada tahun 2011 produksi sebesar 8.604,8 ton, kemudian pada tahun 2012 produksi

menurun menjadi 8.604,3 ton. Pada tahun 2013 produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan yakni 9.429 ton. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya kembali menunjukkan peningkatan yakni sebesar 9.733 ton. Pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 14.642,26 ton. pada sektor perikanan budidaya laut maupun darat juga ada dua jenis komoditi yakni ikan dan udang. Pada kurun waktu 2011 – 2015, sama halnya dengan perikanan tangkap, perkembangan komoditas ikan untuk perikanan budidaya juga tampak mendominasi produksi, dengan produksi sebesar 8.105,8 ton pada tahun 2011, dimana pada tahun yang sama, komoditas udang hanya menghasilkan produksi sebesar 499 ton. Pada tahun 2012 komoditas ikan dengan produksi sebesar 8.105,3 ton dan komoditas udang masih sama dengan produksi tahun sebelumnya dengan produksi sebesar 499 ton. Pada tahun 2013 komoditas ikan dengan produksi sebesar 8.929,5 ton dan komoditas udang dengan produksi sebesar 499,5 ton, naik 0,5 ton dari produksi tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 produksi komoditas ikan sebesar 9.239 ton dan komoditas udang sebesar 494 ton. Pada tahun 2015 produksi komoditas ikan sebesar 14.144,7 ton dan komoditas udang dengan produksi sebesar 497,7 ton.

Adapun produksi perikanan budidaya dari sektor ikan hias yang juga selalu menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 produksi perikanan hias sebesar 167.077.700 ekor dan komoditas ikan koi yang mendominasi dengan produksi sebesar 160.725.500 ekor. Pada tahun 2012 produksi ikan hias sebesar

176.647.000 ekor dengan dominasi produksi ikan koi sebesar 160.725.500 ekor. Pada tahun 2013 produksi ikan hias meningkat dengan total produksi sebesar 200.800.000 ekor dengan dominasi produksi ikan koi sebesar 200.800.000 ekor. Pada tahun 2014 produksi ikan hias kembali meningkat dengan total produksi sebesar 233.268.000 ekor dengan dominasi produksi ikan koi sebesar 227.040.000 ekor. Pada tahun 2015 produksi ikan hias sebesar 234.342.000 ekor dengan dominasi produksi ikan koi sebesar 228.140.000 ekor.

4.2.2 Perkembangan dan Komposisi Luas Lahan

Selama periode pengamatan yakni dalam kurun waktu 2011-2015, perkembangan dan komposisi luas lahan perikanan di Kabupaten Blitar terbagi atas dua yaitu luas areal budidaya ikan dan luas areal pemeliharaan / penangkapan ikan. Untuk luas areal budidaya dibagi atas tambak, kolam, minapadi, karamba dan jarring apung. Pada tahun 2011-2015 kolam yang memiliki luas yang terbesar kemudian tambak, minapadi, jarring apung dan yang terakhir karamba. Untuk kolam memiliki luas 96,2 Ha, kemudian tambak seluas 57 tambak Ha, minapadi 47 Ha, jarring apung 1.540 m² dan yang terakhir karamba dengan luas 60 m². Jumlah luas keseluruhan kolam, tambak, minapadi, jarring apung dan karamba, untuk tahun 2011 - 2015 seluas 200,354 ha.

Sedangkan untuk luas areal pemeliharaan/penangkapan ikan di Kabupaten Blitar juga sangat bervariasi, dimana luas lahannya dibagi atas: laut, sungai, dan waduk. Untuk laut memiliki panjang pantai 45 km, sungai memiliki panjang 319 km, dan waduk memiliki luas 390 Ha.



Gambar 1. Pasar ikan Tambak Rejo



Gambar 2. Pelabuhan



Gambar 3. Kapal Nelayan



Gambar 4. Budidaya Ikan Lele

4.2.3 Perkembangan dan Komposisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang bergerak pada subsektor perikanan di Kabupaten Blitar terbagi atas dua bagian yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk tenaga kerja di sektor perikanan budidaya terlihat bahwa tidak ada kenaikan maupun penurunan dari tahun 2011-2013 yakni sebanyak 25.887 orang, sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 20 orang, dan total keseluruhan menjadi 25.907 orang, namun pada tahun 2015 kembali tidak ada kenaikan maupun penurunan. Untuk tenaga kerja di sektor perikanan tangkap terlihat bahwa dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami peningkatan yakni pada tahun 2011 sebanyak 430 orang, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 200 orang dengan total keseluruhan menjadi 630 orang, pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebanyak 268 orang sehingga total keseluruhan tenaga kerja pada tahun 2013 menjadi 898 orang, pada tahun 2014 tidak ada kenaikan maupun penurunan, dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebanyak 37 orang sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 935 orang. Jumlah keseluruhan tenaga kerja disektor perikanan budidaya maupun perikanan tangkap pada tahun 2011 sebanyak 26.317 orang, pada tahun 2012 sebanyak 26.517 orang, pada tahun 2013 sebanyak 26.785 orang, pada tahun 2014 sebanyak 26.805 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 26.842 orang, sehingga dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah tenaga kerja perikanan atau nelayan yang terdapat di Kabupaten Blitar sebanyak 26.842 orang.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, secara umum telah menunjukkan peran sektor industri yang tadinya dijadikan tulang punggung perekonomian nasional ternyata tidak dapat bertahan dalam menghadapi badai krisis yang menerpa Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Adapun sektor yang justru mampu bertahan di tengah situasi tersebut adalah sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah untuk menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional, seharusnya diarahkan pada industri-industri yang mendukung pengoptimalan hasil sektor pertanian disamping pengembangan industri-industri selain sektor pertanian.

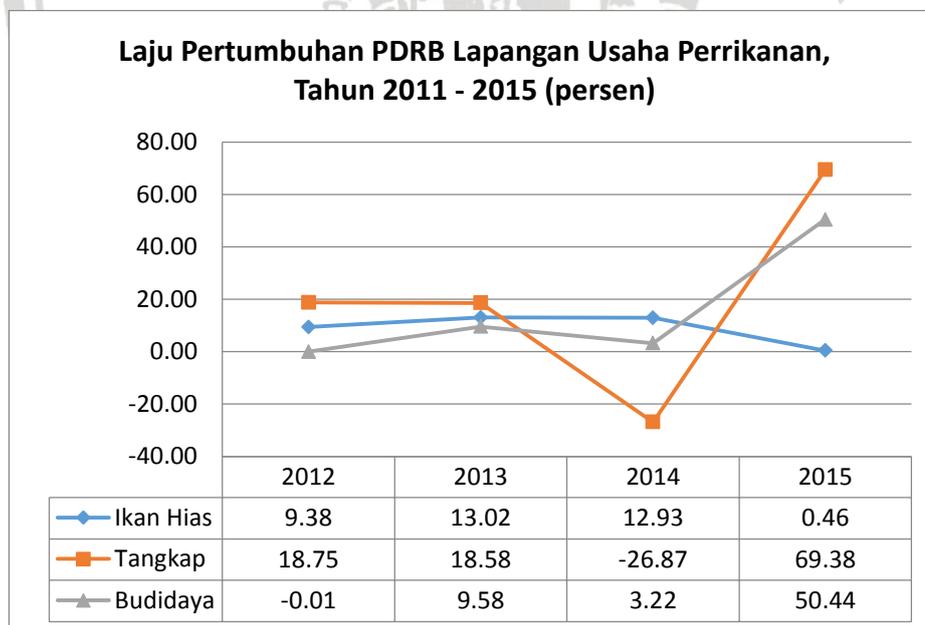
Subsektor perikanan sebagai salah satu penopang sektor pertanian perlu kiranya mendapat perhatian dalam bentuk pengelolaan yang lebih memadai agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal, tentunya dengan tetap mengedepankan kelestarian alam yang ada di sekitarnya atau yang umum dikenal dengan sebutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bentuk-bentuk perhatian yang mungkin diberikan antara lain adalah bantuan teknik dan manajemen dalam pengelolaan subsektor perikanan.

Kebutuhan akan komoditas yang dihasilkan oleh subsektor perikanan diperkirakan akan meningkat seiring dengan berlalunya waktu, hal tersebut dapat kita lihat dari peningkatan jumlah dan volume

komoditas perikanan itu sendiri. Peningkatan tersebut secara umum dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besarnya kebutuhan akan komoditas perikanan tersebut. Adapun kebutuhan akan komoditas perikanan untuk daerah tingkat II Blitar yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat akan komoditas yang dihasilkan oleh subsektor perikanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015

tahun	jumlah produksi			Laju Pertumbuhan		
	Ikan Hias	Tangkap	Budidaya	Ikan Hias	Tangkap	Budidaya
2011	167.08	1,276.60	8,604.80			
2012	182.76	1,516.00	8,604.30	9.38	18.75	-0.01
2013	206.56	1,797.60	9,429.00	13.02	18.58	9.58
2014	233.27	1,314.50	9,733.00	12.93	-26.87	3.22
2015	234.34	2,226.45	14,642.26	0.46	69.38	50.44



Berdasarkan Tabel 5.1 dan Grafik 5.1.1 mengenai perkembangan produksi subsektor perikanan yang memperlihatkan pertumbuhan yang mengembirakan yang pada awalnya tahun 2011 dengan jumlah produksi sebanyak 167,08 juta ekor ikan hias, 8.604,80 ton perikanan budidaya, dan 1.276,60 ton perikanan tangkap. pada tahun 2012 pertumbuhan produksi ikan hias mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni 9,38% dengan jumlah produksi sebanyak 182,76 juta ekor ikan hias, untuk sektor perikanan tangkap juga mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi yakni dengan persentase pertumbuhan produksi sebesar 18,75% menunjukkan jumlah produksi sebesar 1.516 ton, namun untuk sektor perikanan budidaya mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan sebesar -0,01% dengan jumlah produksi sebesar 8.604,30 ton. Tingkat pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan secara keseluruhan pada tahun 2013 baik dari sektor ikan hias, perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, untuk ikan hias mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 13,02% yakni dengan produksi sebesar 206,56 juta ekor, perikanan tangkap dengan pertumbuhan sebesar 18,58% dan produksi sebesar 1.797,6 ton, dan perikanan budidaya pertumbuhannya meningkat sebesar 9,58% dengan produksi 9.429 ton. pada tahun 2014 pertumbuhan produksi ikan hias sebesar 12,93%, perikanan tangkap -26,87% dan perikanan budidaya 3,22% , masing masing produksi sebesar 233,27 juta ekor untuk ikan hias, 1.314, 5 ton ikan tangkap dan 9.733 ton perikanan budidaya. Pada tahun 2015, ikan hias, perikanan tangkap, perikanan budidaya semuanya mengalami peningkatan. Adapun jumlah

produksinya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2013 sebanyak 206,56 juta ekor ikan hias, 8.392 ton ikan air tawar, dan 1.537,21 ton ikan laut, pada tahun 2014 sebanyak 223,27 juta ekor ikan hias, 9.475 ton ikan air tawar, dan 1.063,62 ton ikan laut, dan pada tahun 2015 pertumbuhan ikan hias meningkat 0,46% dengan produksi sebesar 234,34 juta ekor, untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengalami peningkatan produksi yang sangat tinggi dengan laju pertumbuhan masing masing sebesar 69,38% untuk perikanan tangkap dan 50,44% untuk perikanan budidaya, adapun jumlah produksinya sebesar 2.226,45 ton perikanan tangkap dan 14.642,26 ton perikanan budidaya. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2014 perikanan tangkap di Kabupaten Blitar mengalami penurunan produksi yang cukup tinggi yang disebabkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jawa Timur, yang juga menyebabkan produksi perikanan tangkap di beberapa daerah di Jawa Timur juga mengalami penurunan yang cukup tinggi. Para petani tambak juga mengalami gagal panen sehingga hasil yang mereka dapatkan jauh lebih sedikit. Selain itu, masyarakatnya belum dapat memanfaatkan sungai yang ada untuk dijadikan tempat pembudidayaan ikan sungai karena kurangnya pengetahuan mereka dalam hal tersebut, mereka hanya fokus kepada laut dan tambak.

5.2. Perkembangan dan Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Perikanan dengan Jumlah Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini juga banyak dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola

dan memberdayakan bahan baku yang dimiliki agar mempunyai nilai jual yang tinggi atau bersaing dengan nilai jual yang dimiliki oleh produsen-produsen di negara lain dalam rangka menghadapi era pasar bebas atau globalisasi ekonomi.

Daya saing produk atau jasa yang dimiliki merupakan salah satu tolak ukur dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengelola sumber daya bahan mentah yang dimiliki untuk kemudian dijadikan produk-produk yang mempunyai daya saing tinggi yang dengan sendirinya akan meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang kualitas maupun sudut pandang kuantitasnya.

Oleh karena itu pengelolaan terhadap sumber daya manusia selayaknya dijadikan prioritas dalam pembangunan kembali fundamental perekonomian yang tengah dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, di samping hal-hal lain yang dianggap perlu guna mengembalikan kestabilan kondisi perekonomian tersebut.

Untuk mengetahui besarnya persentase jumlah tenaga kerja dari keseluruhan sektor ekonomi yang terdapat di daerah tingkat II Blitar yang dapat diserap oleh subsektor perikanan, maka akan disajikan dalam Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Persentase Tenaga Kerja Subsektor Perikanan Terhadap Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi DI Kabupaten Blitar, 2011-2015

Tahun	Tenaga Kerja Subsektor Perikanan	Tenaga Kerja 17 Sektor Ekonomi	Persentase
2011	26.317	569.483	4,62
2012	26.517	610.130	4,35
2013	26.785	593.213	4,52
2014	26.805	587.403	4,56
2015	26.842	580.982	4,62

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BPS Blitar, data diolah

Dari Tabel 5.2. untuk sektor perikanan selama kurun waktu 2011-2015, dimana mengalami kenaikan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2012 sebesar 26.517 orang tenaga kerja jika dibanding dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2011 sebesar 26.317 orang tenaga kerja yang berarti terdapat selisih sebesar 200 orang tenaga kerja, yang kemudian kembali naik menjadi 26.785 orang tenaga kerja pada tahun 2013 yang berarti terdapat selisih sebesar 262 orang tenaga kerja. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga menjadi sebesar 26.805 yang berarti terdapat peningkatan sebesar 20 orang tenaga kerja. Begitu juga pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sehingga menjadi sebesar 26.842 orang tenaga kerja yang juga berarti terdapat peningkatan sebesar 37 orang tenaga kerja.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat juga dilihat jumlah tenaga kerja untuk seluruh sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2011 - 2015, dimana pada tahun 2011 sebesar 569.483 orang tenaga kerja dan pada tahun 2012 sebesar 610.130 orang tenaga kerja,

dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 40.647 orang tenaga kerja. Selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 593.213 orang tenaga kerja, dalam hal ini terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 16.917 orang tenaga kerja, dan pada tahun 2014 sebesar 587.403 orang tenaga kerja, dalam hal ini terjadi lagi penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 5.810 orang tenaga kerja, serta pada tahun 2015 sebesar 580.982 orang tenaga kerja, dalam hal ini kembali terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 6.421 orang tenaga kerja.

Selanjutnya dari tabel tersebut, kita juga dapat melihat besarnya persentase jumlah tenaga kerja 17 sektor ekonomi yang terserap ke subsektor perikanan yang berkisar antara 4,35% - 4,62%, dimana terjadi penurunan persentase jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2012 dengan angka sebesar 4,35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2011 dengan angka sebesar 4,62%, jadi terdapat penurunan sebesar 0,33% , hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor perikanan lebih kecil dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja 17 sektor ekonomi yang ada di kabupaten Blitar. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi peningkatan persentase jumlah tenaga kerja yang terserap, dimana pada tahun 2013 sebesar 4,52%, dan naik menjadi 4,56% pada tahun 2014 dengan tingkat kenaikan sebesar 0,04%, serta kembali naik menjadi 4,62% pada tahun 2015 dengan tingkat kenaikan sebesar 0,06%. Baik peningkatan maupun penurunan persentase jumlah tenaga kerja subsektor perikanan terhadap

17 sektor ekonomi tersebut umumnya sebagai akibat dari tidak sebandingnya peningkatan jumlah tenaga kerja antar keduanya. Namun daya serap tenaga kerja subsektor perikanan terhadap 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar menunjukkan nilai yang menggembirakan yakni yang berkisar antara 4,35% - 4,62%. Hal ini dapat pula diartikan bahwa terdapat sekitar 4,35% - 4,62% dari tenaga kerja secara keseluruhan dari berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Blitar yang diserap oleh subsektor perikanan. Berdasarkan data tersebut, setelah dilakukan perhitungan maka persentase pertumbuhannya secara keseluruhan dapat di simpulkan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang perikanan dan selain itu juga disebabkan karena sebagian dari tenaga kerja yang tadinya tidak bekerja ataupun bergerak di bidang selain perikanan beralih profesi menjadi ke bidang perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

5.3. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi

Perkembangan ekonomi suatu daerah tergantung pada potensi sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut. Berbagai langkah dan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah dengan dukungan segenap lapisan masyarakat telah berhasil, meskipun beberapa tantangan harus dilalui. Hal ini tercermin dari nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hasil-hasil pembangunan

tersebut telah telah kita rasakan bersama. Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk kemajuan perekonomian daerah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, tentunya di pandang dari sudut kemampuan dari masing-masing sektor untuk memberikan kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Peranan suatu sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah juga merupakan cerminan peranan sektor tersebut dalam pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pembangunan daerah-daerah di Jawa Timur pada umumnya dan di Kabupaten Blitar pada khususnya mengalami peningkatan yang cukup menggembarikan dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang sosial. Hal ini dimungkinkan oleh adanya usaha dari pemerintah dan masyarakat di daerah ini untuk bersinergi dalam pembangunan daerah tingkat II Blitar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun, yang dihitung atas dasar harga konstan. Adapun pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar selama periode 2011-2015 dihitung atas dasar harga konstan.

Untuk memudahkan analisa yang dilakukan, maka data mengenai PDRB daerah tingkat II Blitar akan dibagi ke dalam dua bagian yakni,

pertama, PDRB dan Distribusi Persentase PDRB secara keseluruhan memasukkan subsektor perikanan, *kedua*, PDRB dan Distribusi Persentase PDRB tanpa memasukkan subsektor perikanan. Pada tabel berikut ini akan disajikan PDRB dan Distribusi Persentase PDRB secara keseluruhan memasukkan subsektor perikanan:

Tabel 5.3a. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

Termasuk Subsektor Perikanan

Tahun	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (Juta Rp)	PDRB Subsektor Perikanan (Juta Rp)	PDRB 17 Sektor Ekonomi (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2011	5.899.263,20	651,833.60	17,093,902.35	34,51
2012	6.204.675,30	754,154.32	18,054,455.60	34,37
2013	6.355.112,88	833,723.25	18,967,279.93	33,50
2014	6.545.457,83	907,636.52	19,920,156.47	32,86
2015	6.810.853,31	969,247.02	20,925,474.26	32,55

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Blitar

Berdasarkan Tabel 5.3a, dapat kita lihat pembentukan PDRB Kabupaten Blitar dengan mengikutsertakan subsektor perikanan, untuk tahun 2011 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 5.899.263,20 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 17.093.902,35 (juta Rp), dimana kontribusi subsektor perikanan sebesar 651.833,60 (juta Rp), pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebesar 6.204.675,3 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 18.054.455,60 (juta Rp), dimana kontribusi subsektor perikanan sebesar 754.154,32 (juta Rp). Untuk tahun 2013

kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 6.355.112,88 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 18.967.279,93 (juta Rp), dimana kontribusi subsektor perikanan sebesar 833.723,25 (juta Rp), tahun 2014 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebesar 6.545.457,83 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 19.920.156,47 (juta Rp), dimana kontribusi subsektor perikanan sebesar 907.636,52 (juta Rp) dan untuk tahun 2015 kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah sebesar 6.810.853,31 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 20.925.474,26 (juta Rp), dimana kontribusi subsektor perikanan sebesar 969.247,02 (juta Rp).

Secara umum dapat dikatakan bahwa sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam kurun waktu pengamatan yaitu tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan dan mendominasi atau memberikan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan sektor lain, peningkatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, banyaknya masyarakat yang berahlih profesi menjadi nelayan terutama untuk menjadi petani tambak/kolam, jenis armada yang digunakan juga sudah mulai canggih dan modern, serta lahan yang digunakan untuk dijadikan lahan budidaya baik untuk ikan maupun udang semakin luas karena masyarakat melihat sangat menguntungkan jika mereka mengolah lahan tersebut untuk dijadikan lahan budidaya ikan dan udang terutama untuk dijadikan tambak/empang, sehingga hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di daerah Kabupaten Blitar selayaknya diberi ruang yang lebih luas guna dijadikan *leading sektor* dalam menopang

rata-rata 12,99% per tahun, lalu disusul lagi sektor konstruksi yang berkisar antara 8,67% - 9,13% atau dengan rata-rata 8,93% per tahun, selanjutnya disusul oleh sektor informasi dan komunikasi yang berkisar antar 4,90% - 5,31% atau dengan rata-rata 5,1% per tahun, selanjutnya untuk sektor pertambangan dan penggalian yang berkisar antara 4,1% - 4,6% atau dengan rata-rata 4,32% per tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh sektor jasa pendidikan yang berkisar antara 3,96% - 4,17% atau dengan rata-rata 4,08% per tahun, dan kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang berkisar antara 3,25% - 3,85% dengan rata-rata 3,58% per tahun, selanjutnya disusul oleh sektor jasa keuangan dan asuransi yang berkisar antara 2% - 2,32% dengan rata-rata 2,24% per tahun, selanjutnya untuk sektor real estate yang berkisar antara 1,74% - 1,89% atau dengan rata-rata 1,81% per tahun, selanjutnya untuk sektor jasa lainnya yang berkisar antara 1,37% - 1,49% atau dengan rata-rata 1,4% per tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang berkisar antara 1,15% - 1,21% atau dengan rata-rata 1,18% per tahun, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkisar antara 0,82% - 0,87% atau dengan rata-rata 0,85% per tahun, yang dilanjutkan oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang berkisar antara 0,71% - 0,77% atau dengan rata-rata 0,74% per tahun, yang kemudian disusul oleh sektor jasa perusahaan yang berkisar antara 0,33% - 0,36% atau dengan rata-rata 0,35% per tahun, dan kemudian sektor pengadaan listrik dan gas yang berkisar antara 0,05% - 0,07% dengan rata-rata 0,06% per tahun, serta

yang berada di urutan yang paling bawah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang berkisar antara 0,03% - 0,04% dengan rata-rata 0,03% per tahun.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah tingkat II Blitar sangat besar, utamanya dilihat dari sudut pandang kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Blitar jika dibandingkan dengan sektor lain. Bahkan nilai yang ditunjukkan oleh tabel distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto yang sangat mencolok adalah sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berada di Kabupaten Blitar.

Setelah menyajikan perkembangan PDRB Kabupaten Blitar beserta dengan distribusinya di mana di dalamnya termasuk subsektor perikanan, maka selanjutnya akan disajikan dan dibahas tentang perkembangan PDRB Kabupaten Blitar beserta dengan distribusinya tanpa subsektor perikanan.

Tabel 5.3c. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011–2015 (Juta Rp)

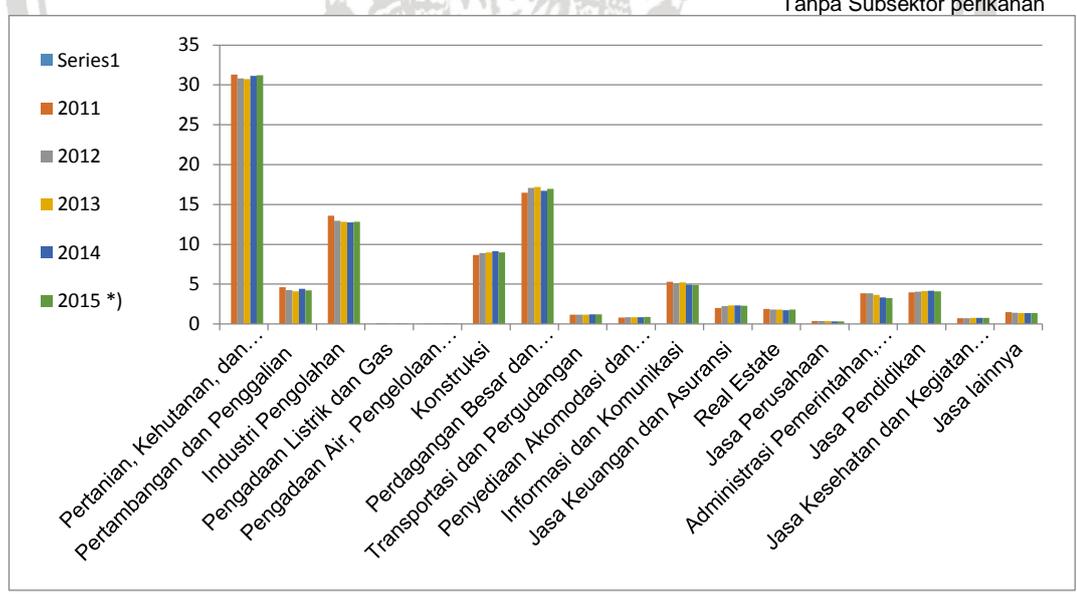
Tahun	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (Juta Rp)	PDRB Subsektor Perikanan (Juta Rp)	Tanpa Subsektor perikanan	
			PDRB 17 Sektor Ekonomi (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2011	5.247.429,60	651,833.60	16,442,068.75	31,91
2012	5,450,520.98	754,154.32	17,300,301.28	31,50
2013	5,521,389.63	833,723.25	18,133,556.68	30,45
2014	5,637,821.31	907,636.52	19,012,519.95	29,65
2015	5,841,606.29	969,247.02	19,956,227.24	29,27

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Blitar

Pada Tabel 5.3c dapat kita lihat dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar tanpa memasukkan subsektor perikanan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masih mendominasi dibanding dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yang ada di Kabupaten Blitar, pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.247.429,60 (juta Rp) dari total PDRB sebesar 16.442.068,75 (juta Rp), dalam hal ini terjadi penurunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan di total PDRB sebesar 651.833,60 (juta Rp), pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.450.520,98 (juta Rp) dari total PDRB pada tahun yang sama sebesar 17.300.301,28 (juta Rp), dalam hal ini terjadi penurunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan di total PDRB sebesar 754.154,32 (juta Rp), pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.521.389,63 (juta Rp) dari total PDRB pada tahun yang sama sebesar 18.133.556,68 (juta Rp), dalam hal ini

terjadi penurunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan di total PDRB sebesar 833.723,25 (juta Rp), dan pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.637.821,31 (juta Rp) dari total PDRB pada tahun yang sama sebesar 19.012.519,95 (juta Rp), dalam hal ini terjadi penurunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan di total PDRB sebesar 907.636,52 (juta Rp), serta pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5.841.606,29 (juta Rp) dari total PDRB pada tahun yang sama sebesar 19.956.227,24 (juta Rp), dalam hal ini terjadi penurunan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan di total PDRB sebesar 969.247,02 (juta Rp),

Tabel 5.3d. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (%)



Sedangkan jika kita mengalihkan perhatian ke Tabel 5.3d, maka kita akan melihat perkembangan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto untuk kurun waktu 2011-2015 dari berbagai sektor atau

lapangan usaha tanpa memasukkan subsektor perikanan. Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat bahwa dari 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang telah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Blitar yang berkisar antara 30,75% - 31,30% atau dengan rata-rata 31,04% per tahun selama periode pengamatan yakni dalam kurun waktu 2011-2015, kemudian disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang berkisar antara 16,47% - 17,20% atau dengan rata-rata 16,88%, yang kemudian disusul dengan sektor industri pengolahan yang berkisar antara 12,75% - 13,59% atau dengan rata-rata 12,99% per tahun, lalu disusul lagi sektor konstruksi yang berkisar antara 8,67% - 9,13% atau dengan rata-rata 8,93% per tahun, selanjutnya disusul oleh sektor informasi dan komunikasi yang berkisar antar 4,90% - 5,31% atau dengan rata-rata 5,1% per tahun, selanjutnya untuk sektor pertambangan dan penggalian yang berkisar antara 4,1% - 4,6% atau dengan rata-rata 4,32% per tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh sektor jasa pendidikan yang berkisar antara 3,96% - 4,17% atau dengan rata-rata 4,08% per tahun, dan kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang berkisar antara 3,25% - 3,85% dengan rata-rata 3,58% per tahun, selanjutnya disusul oleh sektor jasa keuangan dan asuransi yang berkisar antara 2% - 2,32% dengan rata-rata 2,24% per tahun, selanjutnya untuk sektor real estate yang berkisar antara 1,74% - 1,89% atau dengan rata-rata 1,81% per tahun, selanjutnya untuk sektor jasa lainnya yang berkisar antara 1,37% - 1,49% atau dengan rata-

rata 1,4% per tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang berkisar antara 1,15% - 1,21% atau dengan rata-rata 1,18% per tahun, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkisar antara 0,82% - 0,87% atau dengan rata-rata 0,85% per tahun, yang dilanjutkan oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang berkisar antara 0,71% - 0,77% atau dengan rata-rata 0,74% per tahun, yang kemudian disusul oleh sektor jasa perusahaan yang berkisar antara 0,33% - 0,36% atau dengan rata-rata 0,35% per tahun, dan kemudian sektor pengadaan listrik dan gas yang berkisar antara 0,05% - 0,07% dengan rata-rata 0,06% per tahun, serta yang berada di urutan yang paling bawah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang berkisar antara 0,03% - 0,04% dengan rata-rata 0,03% per tahun.

Melihat perbandingan antara PDRB Kabupaten Blitar yang mengikutsertakan subsektor perikanan di dalamnya dengan PDRB Kabupaten Blitar tanpa mengikutsertakan subsektor perikanan di dalamnya, terlihat dengan jelas bahwa kontribusi subsektor perikanan cukup besar peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Blitar, baik kontribusinya terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan maupun kontribusinya terhadap seluruh sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Blitar.

Akan dibahas mengenai besarnya kontribusi subsektor perikanan terhadap keseluruhan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar yang didasarkan pada tabel PDRB Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui

besarnya kontribusi subsektor perikanan terhadap 17 sektor ekonomi akan disajikan pada Tabel 5.3e, berikut ini:

Tabel 5.3e. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi Kabupaten Blitar

Tahun	PDRB Subsektor Perikanan (Juta Rp)	PDRB 17 Sektor Ekonomi (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2011	651.833,60	17.093.902,35	3,81
2012	754.154,32	18.054.455,60	4,18
2013	833.723,25	18.967.279,93	4,40
2014	907.636,52	19.920.156,47	4,56
2015	969.247,02	20.925.474,26	4,63

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BPS Blitar, data diolah

Tabel 5.3f. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap 17 Sektor Ekonomi Nasional

Tahun	PDB Subsektor Perikanan (Milyar Rp)	PDB 17 Sektor Ekonomi (Milyar Rp)	Kontribusi (%)
2011	154.545,20	7.142.634,20	2,16
2012	164.264,30	7.560.262,80	2,17
2013	176.149,30	7.953.312,30	2,21
2014	189.089,70	8.351.368,70	2,26
2015	204.016,80	8.699.535,30	2,35

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan pada Tabel 5.3e, di atas, dapat diuraikan bahwa PDRB subsektor perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2011 sebesar 651.833,60 (juta Rp), dan pada tahun 2012 sebesar 754.154,32 (juta Rp), kemudian pada tahun 2013 sebesar 833.723,25 (juta Rp), selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 907.636,52 (juta Rp), selanjutnya yang terakhir pada tahun 2015 sebesar 969.247,02 (juta Rp). Begitu juga dengan PDRB 17 sektor ekonomi juga mengalami

peningkatan, di mana pada tahun 2011 sebesar 17.093.902,35 (juta Rp), dan pada tahun 2012 sebesar 18.054.455,60 (juta Rp), kemudian pada tahun 2013 sebesar 18.967.279,93 (juta Rp), selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 19.920.156,47 (juta Rp), selanjutnya yang terakhir pada tahun 2015 sebesar 20.925.474,26 (juta Rp). Selanjutnya kita juga dapat melihat nilai kontribusi subsektor perikanan, di mana yang terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar 4,63% dan yang terkecil pada tahun 2011 sebesar 3,81%, sedangkan nilai rata-rata kontribusi subsektor perikanan selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 4,31%. Secara keseluruhan, kontribusinya dapat dikatakan selalu naik dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh pemerintah dan banyaknya masyarakat yang sadar akan besarnya potensi perikanan yang ada di Kabupaten Blitar.

Sedangkan jika kita mengalihkan perhatian ke Tabel 5.3f, maka kita akan melihat kontribusi subsektor perikanan nasional terhadap Produk Domestik Bruto untuk kurun waktu 2011-2015. Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat bahwa PDB subsektor perikanan nasional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2011 sebesar 154.545,20 (milyar Rp), dan pada tahun 2012 sebesar 164.264,30 (milyar Rp), kemudian pada tahun 2013 sebesar 176.149,30 (milyar Rp), selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 189.089,70 (milyar Rp), selanjutnya yang terakhir pada tahun 2015 sebesar 204.016,80 (milyar Rp). Begitu juga dengan PDB 17 sektor ekonomi juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2011 sebesar 7.142.634,20 (milyar Rp), dan pada tahun 2012 sebesar 7.560.262,80 (juta Rp), kemudian pada tahun 2013 sebesar

7.953.312,30 (juta Rp), selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 8.351.368,70 (juta Rp), selanjutnya yang terakhir pada tahun 2015 sebesar 8.699.535,30 (juta Rp). Selanjutnya kita juga dapat melihat nilai kontribusi subsektor perikanan nasional, di mana yang terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,35% dan yang terkecil pada tahun 2011 sebesar 2,16%, sedangkan nilai rata-rata kontribusi subsektor perikanan selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 2,23%. Secara keseluruhan, kontribusinya dapat dikatakan selalu naik dari tahun ke tahun.

Setelah melihat perbandingan antara kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Blitar dengan kontribusi subsektor perikanan nasional terhadap PDB Nasional, terlihat dengan jelas bahwa kontribusi subsektor perikanan Kabupaten Blitar terhadap PDRB Kabupaten Blitar lebih besar peranannya, dibandingkan dengan kontribusi subsektor perikanan nasional dalam peranannya terhadap pembentukan PDB Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Blitar memang sangat besar, baik dari sisi perikanan darat maupun perikanan laut.

5.4. Elastisitas Kesempatan Kerja

Pembahasan akan dilanjutkan dengan menghitung tingkat elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan di Kabupaten Blitar. Adapun langkahlangkah yang harus ditempuh guna menghitung tingkat elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan yang *pertama*, menghitung persentase pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan, yang *kedua*, menghitung persentase pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan dan yang *ketiga*, membandingkan persentase pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan dengan persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan di Kabupaten Blitar.

Tahap pertama yang dilakukan yaitu menghitung pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan. Adapun untuk menghitung pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan akan disajikan dalam Tabel 5.4a di bawah ini :

Tabel 5.4a. Pertumbuhan Tenaga Kerja Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	Tenaga Kerja Subsektor Perikanan (Orang)	Pertumbuhan (%)
2011	26.317	
2012	26.517	0,76
2013	26.812	1,11
2014	26.832	0,07
2015	26.869	0,14

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Blitar, data diolah.

Berdasarkan Tabel 5.4a terlihat bahwa selalu terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada subsektor perikanan, dapat dilihat pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap pada subsektor perikanan yakni dari 26.317 orang tenaga kerja naik menjadi 26.517 orang tenaga kerja pada tahun 2012, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 0,76%. Kemudian pada tahun 2013 naik lagi menjadi 26.812 orang tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,11% , tingkat perumbuhannya lebih baik jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pendapatan dari subsektor perikanan pada tahun tersebut yang cukup menjanjikan dan produksi

subsektor perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap juga meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan juga ikut meningkat. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan yakni naik menjadi 26.832 orang tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,07%, tingkat perumbuhannya lebih kecil jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena musim yang tidak menentu, sehingga berakibat menurunnya produksi perikanan tangkap pada khususnya jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, dan hal ini berdampak pada pertumbuhan tenaga kerja yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yakni naik menjadi 26.869 orang tenaga kerja dengan tingkat pertumbuhan yang juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 0,07% sekarang naik menjadi 0,14% , hal ini dipengaruhi oleh produksi perikanan tangkap yang kembali naik dibandingkan tahun tahun sebelumnya dan juga produksi perikanan budidaya yang menunjukkan peningkatan, sehingga berdampak juga pada meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap oleh subsektor perikanan selama kurun waktu pengamatan yaitu pada tahun 2011- 2015 menunjukkan angka pertumbuhan yang selalu naik, dan pada hakikatnya jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor perikanan mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan terendah 0,07% pada tahun 2014 dan pertumbuhan tertinggi sebesar 1,11% pada tahun 2013.

Selanjutnya tahap yang kedua yaitu menghitung pertumbuhan PDRB subsektor perikanan Kabupaten Blitar. Adapun untuk menghitung pertumbuhan PDRB subsektor perikanan akan disajikan pada Tabel 5.4b di bawah ini:

Tabel 5.4b. Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015

Tahun	PDRB Subsektor Perikanan (Juta Rp)	Pertumbuhan
2011	651.833,60	
2012	754.154,32	15,70
2013	833.723,25	10,55
2014	907.636,52	8,87
2015	969.247,02	6,79

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Blitar, data diolah

Perkembangan PDRB subsektor perikanan Pada Tabel 5.4b di Kabupaten Blitar meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2011-2015, hal ini merupakan perkembangan yang cukup mengembirakan dari subsektor perikanan, mengingat potensi yang dimiliki oleh subsektor perikanan ini dalam menyumbangkan kontribusinya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan khususnya dan seluruh sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Blitar pada umumnya. Pada tabel tersebut juga dapat pula kita lihat tingkat pertumbuhan PDRB subsektor perikanan dalam kurun waktu 2011-2015 yang berkisar antara 6,79% - 15,70%. Pada tahun 2012 sebesar 15,70% turun menjadi 10,55% pada tahun 2013 dengan tingkat penurunan sebesar 5,15%, pada tahun 2014 turun lagi menjadi 8,87% dengan tingkat penurunan sebesar 1,68%, dalam hal ini sudah lebih baik karena tingkat penurunannya lebih kecil jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 memperlihatkan

hal serupa lagi karena mengalami penurunan sebesar 2,08% sehingga menjadi 6,79%. Pertumbuhan yang tertinggi berada pada tahun 2012 sebesar 15,70% sedangkan tingkat yang terendah berada pada tahun 2015 sebesar 6,79%. Berdasarkan data yang telah dihitung, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan selama periode pengamatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya hasil pemasokan perikanan yang disebabkan oleh musim yang tidak menentu, teknologi dalam bidang perikanan yang masih sederhana, kurangnya pengetahuan atau keahlian masyarakat dalam mengelola hasil-hasil perikanan, dan banyaknya masyarakat yang beralih profesi menjadi petani karena tabama (Tanaman Bahan Makanan) menjadi subsektor yang dominan menonjol selama periode pengamatan.

Berdasarkan pada hal tersebut, peranan subsektor perikanan kiranya perlu mendapat perhatian, utamanya yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh subsektor perikanan yang salah satunya dapat ditempuh dengan memberikan bantuan teknik dan manajemen dalam pengelolaannya sampai kepada pemasaran dari komoditas perikanan itu sendiri. Agar komoditas perikanan ini dapat bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional yang di tinjau dari sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya.

Tahap yang terakhir atau yang ketiga yaitu menghitung perbandingan persentase pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan dengan persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan di

Kabupaten Blitar. Adapun perhitungannya akan disajikan pada Tabel 5.4c. dibawah ini :

Tabel 5.4c. Elastisitas Kesempatan Kerja Subsektor Perikanan Kabupaten Blitar, Tahun 2011-2015

Tahun	Pertumbuhan Pekerja Subsektor Perikanan (%)	Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	Elastisitas Kesempatan Kerja Subsektor Perikanan
2011			
2012	0,76	15,70	0,048
2013	1,11	10,55	0,105
2014	0,07	8,87	0,008
2015	0,14	6,79	0,021

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BPS Blitar, data diolah

Berdasarkan Tabel 5.4c di atas, tampak bahwa elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan pada tahun 2012 menunjukkan nilai sebesar 0,048 dan dikatakan inelastis yang berarti jika terjadi perubahan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan pekerja subsektor perikanan sebanyak 0,048. Demikian juga untuk tahun 2013 elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan adalah sebesar 0,105 yang berarti jika terjadi perubahan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan pekerja subsektor perikanan sebanyak 0,105 dan dapat dikatakan inelastis. Untuk tahun 2014 hasilnya juga inelastis, dimana nilai elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan hanya sebesar 0,008 yang berarti jika terjadi perubahan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan pekerja subsektor perikanan sebanyak 0,008. Selanjutnya untuk tahun 2015 dimana nilai elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan sebesar 0,021 yang

berarti jika terjadi perubahan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebanyak 1% maka akan mengakibatkan perubahan pertumbuhan pekerja subsektor perikanan sebanyak 0,021 atau dengan kata lain dapat dikatakan inelastis. Sedangkan nilai rata-rata elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan subsektor perikanan selama kurun waktu 2011-2015 adalah sebesar 0,045. Secara keseluruhan, elastisitas dapat dikatakan inelastis (tidak elastis), karena setiap perubahan atau kenaikan pada pertumbuhan PDRB subsektor perikanan sebesar 1%, akan mempengaruhi kesempatan kerja dibawah 1 %, yaitu sebesar 0,045.

Berdasarkan data yang telah dihitung, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan elastisitas kesempatan kerja yang diperoleh dari perbandingan antara pertumbuhan pekerja subsektor perikanan dengan pertumbuhan PDRB subsektor perikanan yang ada di Kabupaten Blitar sempat mengalami penurunan selama periode pengamatan yaitu pada tahun 2014, hal ini disebabkan oleh menurunnya hasil produksi perikanan pada tahun tersebut khususnya perikanan tangkap, yang disebabkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi pada saat itu.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB subsektor perikanan akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja subsektor perikanan Kabupaten Blitar atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan PDRB subsektor perikanan akan membawa akibat bagi meningkatnya kesempatan kerja subsektor perikanan di Kabupaten Blitar. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan subsektor perikanan akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlihat melalui

perhitungan PDRB, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi pula pengguna tenaga kerja dan akan menciptakan peluang bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, subsektor perikanan ini memang layak untuk ditumbuhkembangkan dan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah.

5.5. Perkembangan Pendapatan Perkapita

Dengan berkembangnya perekonomian Kabupaten Blitar dan melambatnya pertumbuhan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB Perkapita. Namun demikian angka tersebut tidak menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata, karena angka tersebut hanya merupakan angka rata-rata, dan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dengan melihat besarnya angka PDRB Perkapita. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Pendapatan Perkapita) adalah salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dalam waktu tertentu.

Berdasarkan uraian mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar ditinjau dari sudut pandang perkembangan dari tahun ke tahun maupun dari sudut pandang kontribusi persektoranya, maka dapat diperoleh gambaran tentang pendapatan perkapitanya dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Blitar pada satu tahun tertentu, maka secara otomatis setelah menghitung penyusutan dan pajak tak langsungnya akan di peroleh

tingkat pendapatan perkapita yang meningkat pula, dengan asumsi bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atau Dasar Biaya Faktor lebih besar daripada peningkatan jumlah penduduk dalam periode yang sama.

Berikut ini akan disajikan perkembangan pendapatan perkapita di Kabupaten Blitar dengan adanya subsektor perikanan:

Tabel 5.5a. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015.
(Termasuk Subsektor Perikanan)

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	15.197.619,39	
2012	15.971.415,66	5,09
2013	16.686.252,52	4,48
2014	17.461.674,88	4,65
2015	18.269.204,94	4,62

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Blitar, data diolah

Pada Tabel 5.5a di atas terlihat bahwa nilai pendapatan perkapita Kabupaten Blitar yang termasuk subsektor perikanan dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015 menunjukkan peningkatan, dimana pendapatan perkapita daerah ini telah mencapai angka sebesar Rp 15.197.619,39 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 15.971.415,66 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,09% pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 meningkat lagi mencapai nilai Rp 16.686.252,52 dengan tingkat pertumbuhan 4,48% dan pada tahun 2014 terus meningkat hingga mencapai Rp 17.461.674,88 dengan tingkat

pertumbuhan sebesar 4,65%, serta pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 18.269.204,94 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,62%.

Adapun nilai pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Blitar yang termasuk subsektor perikanan selama kurun waktu pengamatan yakni periode 2011-2015 berkisar 4,48% - 5,09%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,71% pertahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,09% dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,48%. Setelah disajikan perkembangan pendapatan perkapita yang termasuk subsektor perikanan, maka selanjutnya akan disajikan pula perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Blitar tanpa mengikutsertakan sektor perikanan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.5b. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2011-2015
(Tanpa Subsektor Perikanan)

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2011	14.618.095,84	
2012	15.304.272,19	4,69
2013	15.952.793,81	4,24
2014	16.666.055,94	4,47
2015	17.422.993,65	4,54

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Blitar, data diolah.

Pada Tabel 5.5b di atas terlihat bahwa nilai pendapatan perkapita Kabupaten Blitar yang tidak termasuk subsektor perikanan dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015 juga menunjukkan peningkatan, dimana

pendapatan perkapita daerah ini telah mencapai angka sebesar Rp 14.618.095,84 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 15.304.272,19 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,69% pada tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013 meningkat lagi mencapai nilai Rp 15.952.793,81 dengan tingkat pertumbuhan 4,24% dan pada tahun 2014 terus meningkat hingga mencapai Rp 16.666.055,94 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,47%, serta pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 17.422.993,65 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,54%.

Adapun nilai pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Blitar yang tidak termasuk subsektor perikanan selama kurun waktu pengamatan yakni periode 2011-2015 berkisar 4,24% - 4,69%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,48% pertahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,69% dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai pertumbuhan sebesar 4,24%.

Setelah melihat perbandingan antara pendapatan perkapita yang termasuk subsektor perikanan dengan pendapatan perkapita tanpa mengikutsertakan subsektor perikanan, maka dapat disimpulkan bahwa subsektor perikanan tidak hanya memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar, akan tetapi juga berperan dalam meningkatkan pendapatan perkapita Kabupaten Blitar.

Apabila kita mencoba mengaitkan antara pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar yang merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi

daerah ini, tenaga kerja dan pendapatan perkapita, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan PDRB akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja melalui kesempatan kerja yang tercipta sebagai akibat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain tenaga kerja yang terserap juga mendorong peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tingkat II Blitar yang juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita daerah tingkat II Blitar.

5.6. Implikasi

Subsektor perikanan di Kabupaten Blitar memberikan manfaat yang besar dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar, terutama dalam memberikan kontribusinya terhadap sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan khususnya, maupun sektor ekonomi secara keseluruhan pada umumnya. Dapat dilihat dari besarnya kontribusi subsektor perikanan di kabupaten blitar yang lebih besar dari kontribusi subsektor perikanan

Elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan di Kabupaten Blitar menunjukkan hasil rata rata inelastis, yang artinya adalah keadaan dimana persentase perubahan PDRB lebih besar daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1 (satu).

Maka sebagai implikasinya adalah pemerintah perlu lebih memperhatikan subsektor perikanan, khususnya terkait dengan peningkatan prodksi subsektor perikanan Kabupaten Blitar, supaya

nantinya subsektor perikanan dapat lebih berkontribusi lagi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar. Sehingga kedepannya diharapkan dapat lebih banyak membuka peluang kerja di dalam subsektor perikanan itu sendiri dan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blitar.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang diungkapkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Subsektor perikanan di Kabupaten Blitar memberikan manfaat yang besar dalam menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar, terutama dalam memberikan kontribusinya terhadap sektor pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan khususnya, maupun sektor ekonomi secara keseluruhan pada umumnya. Kontribusi subsektor perikanan terhadap keseluruhan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar didasarkan pada tabel PDRB Kabupaten Blitar atas dasar harga konstan tahun 2011-2015. Besarnya kontribusi subsektor perikanan terhadap 17 sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu pengamatan yakni periode 2011- 2015, dimana yang menunjukkan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah kontribusi subsektor perikanan sebesar 969.247,02 (juta Rp) sedangkan kontribusi 17 sektor ekonomi sebesar 20.925.474,26 (juta Rp), dengan persentase kontribusi 17 sektor ekonomi yang terserap oleh kontribusi subsektor perikanan menunjukkan angka sebesar 4,63%. Sedangkan untuk angka yang terendah terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah kontribusi subsektor perikanan sebesar 651.833,60

(juta Rp) sedangkan kontribusi 17 sektor ekonomi sebesar 17.093.902,35 (juta Rp), dengan persentase kontribusi 17 sektor ekonomi yang terserap oleh kontribusi subsektor perikanan menunjukkan angka sebesar 3,81%.

2. Elastisitas kesempatan kerja subsektor perikanan di Kabupaten Blitar menunjukkan nilai terendahnya berada pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 0,008 dan nilai tertinggi berada pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 0,105 , dan rata rata dari nilai tersebut dapat dikatakan inelastis. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan sangat potensial untuk lebih ditumbuhkembangkan guna memacu peningkatan PDRB, disamping sebagai penyerap tenaga kerja yang memadai guna mengatasi masalah pengangguran.

6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan terhadap kesimpulan akhir yang telah dipaparkan, maka berikut ini akan disajikan beberapa saran, di antaranya:

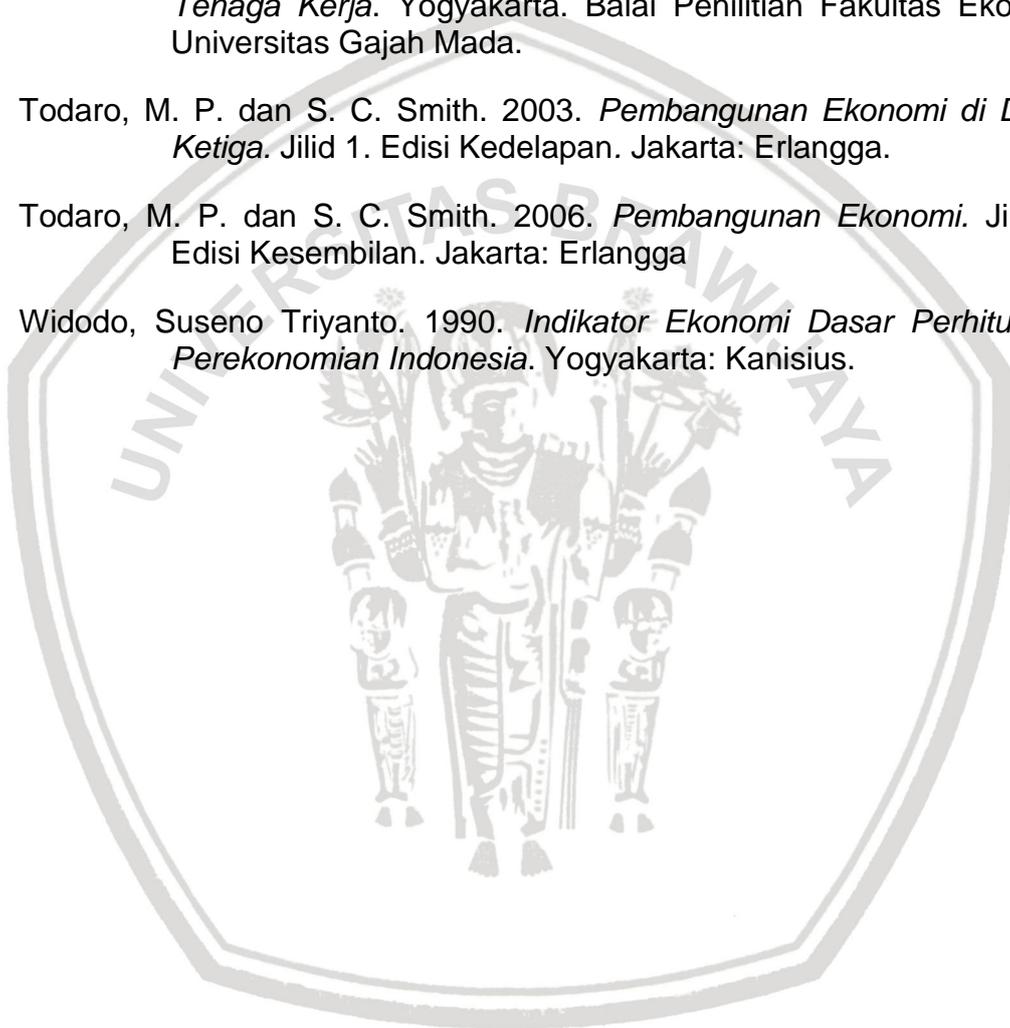
1. pemerintah harus melakukan kebijakan yang lebih baik agar tercipta kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan. Teutama kebijakan yang mengarah kepada peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi perikanan,
2. Masyarakat harus mengadakan pengolahan pasca panen agar hasilnya dapat lebih optimal, disamping itu dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Dinas terkait perlu mengadakan berbagai pelatihan-pelatihan dalam rangka pembinaan yang tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan produksi yang dihasilkan oleh subsektor perikanan, khususnya pelatihan-pelatihan teknik dan manajemen dalam pengelolaan dari komoditas perikanan ini, sampai ke hal-hal mengenai aspek pemasaran dari komoditas perikanan tersebut. Disamping itu perlu kiranya pemerintah selaku pihak yang diharapkan dapat berperan banyak dalam memberi arahan maupun bantuan yang bersifat materil guna membantu masyarakat perikanan dalam pengelolaan subsektor perikanan, khususnya kepada masyarakat perikanan yang mengalami kesulitan dalam hal permodalan, baik itu berupa modal yang diperlukan untuk investasi atau modal yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran operasi sehari-hari (modal operasi).

DAFTAR PUSTAKA

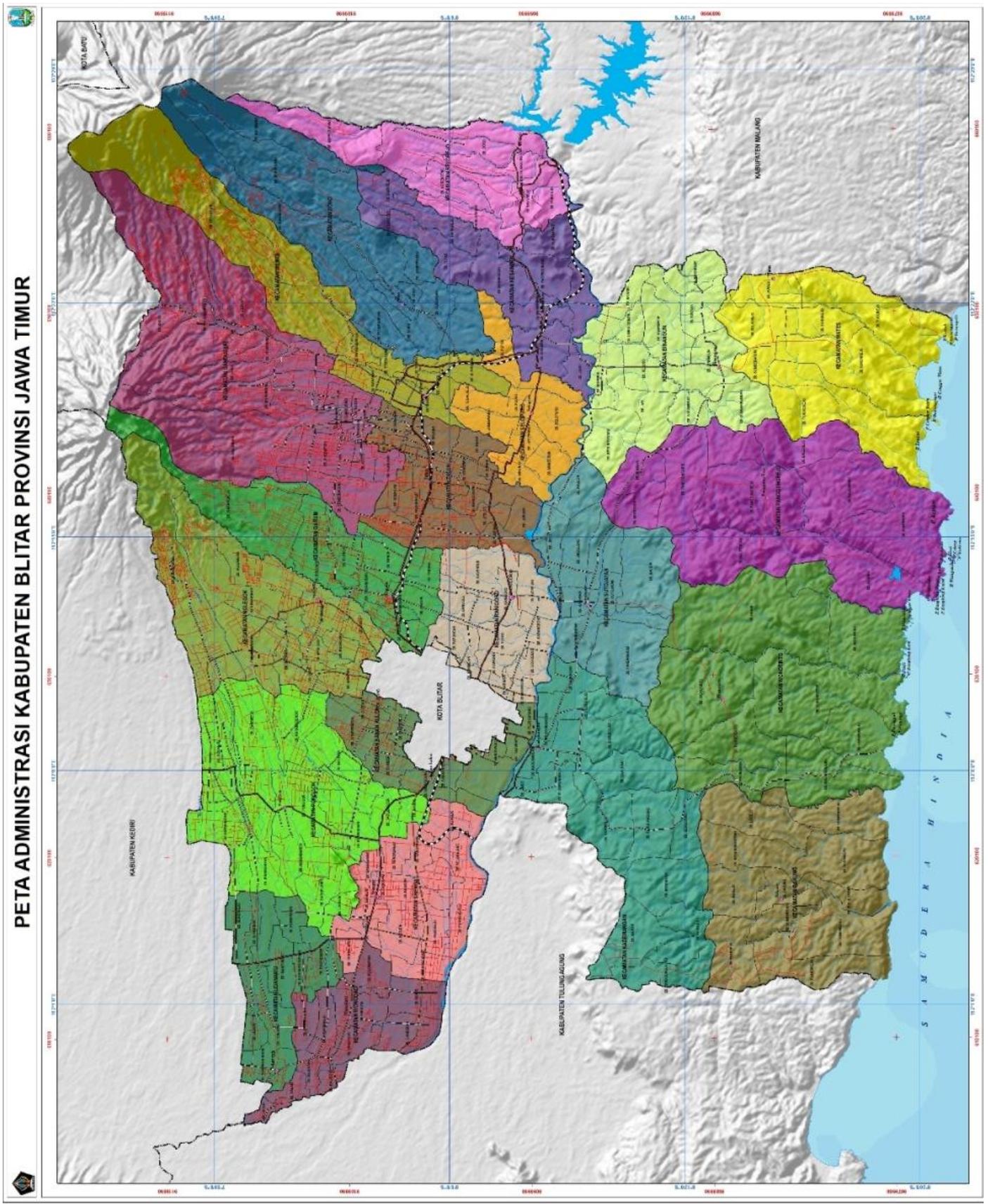
- Arsyad, Lincolin., 1997, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan 2017*. Sulawesi Selatan. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Blitar Dalam Angka 2017*. Blitar. BPS Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar 2011-2015*. Blitar. BPS Blitar.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indikator Ekonomi Kabupaten Pinrang 2015. Blitar*. BPS Blitar.
- Boediono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta. Balai Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan Malayu S.P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia. edisi revisi. cetakan keempat*, penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Richardson, W. Harry, (terjemahan) Paul Sitohang, 2001. *Elements of Regional Economic*, Jakarta. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Robinson Tarigan . 2007. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (edisi revisi)*. Jakarta , PT. Bumi Aksara
- Robinson Tarigan. 2007. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Siagian, H. 1989. *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-Cita dan Realita*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, J. Payaman 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI.
- Soeroto. 1992, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Gajah Mada Universitas Pres, Yogyakarta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bina Grafika.
- Suparmoko, Irawan, 1979. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Balai Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Swasono, Yudo dan Endang Sulistyaningsih, 1993. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta. Balai Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 2. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.



LAMPIRAN

Lampiran 1, Peta Lokasi Kabupaten Blitar





SKALA 1:100,000



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Zona : Selatan 49

LEGENDA

	Kota Kabupaten		Jalan Arteri
	Kota Kecamatan		Jalan Kolektor
	Nama Kampung		Jalan Lokal
	Batas Provinsi		Jalan Lain
	Batas Kota/Kabupaten		Jalan Setapak
	Batas Kecamatan		Garis Pantai
	Batas Desa/Kelurahan		Sungai Induk
	Jalan Kereta Api		Anak Sungai
	Jalan TOL		DAM/Waduk

KEDALAMAN LAUT



KECAMATAN

	BAKUNG		WATES
	BINANGUN		WLINGI
	DOKO		WONODADI
	GANDUSARI		WONOTIRTO
	GARUM		
	KADEMANGAN		
	KANIGORO		
	KESAMBEN		
	NGLEGOK		
	PANGGUNGREJO		
	PONGGOK		
	SANAN KULON		
	SELOPURO		
	SELOREJO		
	SRENGAT		
	SUTOJAYAN		
	TALUN		
	UDANAWU		



SUMBER DATA

1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991
2. Peta ATLAS Provinsi Jawa Timur, Bakosurtanal
3. Peta Infrastruktur Kabupaten Blitar, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
4. Peta Administrasi Kabupaten Blitar, RTRW Tahun 2013 - 2033
5. Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blitar KPU Tahun 2014
6. Digital Elevation Model - SRTM, USGS Tahun 2010
7. Bathymetric Topography, GINA Tahun 2010

DesignMap
Peta Tematik Indonesia
web: <http://peta tematik indonesia.com/>
e: info@peta tematik indonesia.com
mail: peta tematik indonesia@gmail.com



Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015
(Juta Rp) Termasuk Subsektor Perikanan

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	10
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,899,263.20	6,204,675.30	6,355,112.88	6,545,457.83	6,810,853.31
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5,128,432.50	5,295,730.44	5,357,337.04	5,465,160.18	5,657,473.39
	a. Tanaman Pangan	1,453,455.80	1,521,309.30	1,529,592.00	1,549,284.70	1,626,313.50
	b. Tanaman Hortikultura	576,352.00	598,229.02	598,794.40	618,140.77	658,274.45
	c. Perkebunan	806,224.90	833,146.64	847,892.83	884,066.07	902,881.55
	d. Peternakan	2,219,110.80	2,266,066.19	2,301,553.14	2,329,891.51	2,384,080.10
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	73,289.00	76,979.29	79,504.67	83,777.13	85,923.79
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	118,997.10	154,790.54	164,052.59	172,661.13	184,132.90
3	Perikanan	651,833.60	754,154.32	833,723.25	907,636.52	969,247.02
B	Pertambangan dan Penggalian	800,767.90	811,034.85	842,883.46	872,503.63	898,494.95
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
2	Pertambangan Batubara dan Lignit					
3	Pertambangan Bijih Logam	84,364.50	87,147.57	86,910.38	97,664.28	88,741.57
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	716,403.40	723,887.28	755,973.08	774,839.35	809,753.38
C	Industri Pengolahan	2,282,471.40	2,318,192.28	2,431,580.05	2,599,399.72	2,767,881.46
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
2	Industri Makanan dan Minuman	856,110.60	855,158.47	910,259.17	975,212.77	1,078,664.64
3	Pengolahan Tembakau	642,371.40	659,411.13	676,902.35	733,781.24	770,742.92
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3,447.42	3,600.45	3,785.87	3,997.90	4,097.54
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2,370.37	2,457.12	2,564.10	2,707.27	2,757.16
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari	261,648.55	262,502.24	276,119.07	294,130.63	292,684.64
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi	34,442.77	34,878.38	35,067.91	35,296.79	36,686.02
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,527.42	9,103.86	9,800.03	10,452.90	10,854.42
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8,841.86	9,796.36	10,100.02	10,762.19	11,066.80
10	Industri Barang Galian bukan Logam	164,186.50	170,912.87	184,504.04	192,766.63	205,408.01
11	Industri Logam Dasar					
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan P	38,096.29	40,176.73	42,398.12	44,546.38	46,979.47
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	81.69	82.83	83.73	86.77	87.26
14	Industri Alat Angkutan	1,945.56	2,000.26	2,123.73	2,242.53	2,289.42
15	Industri Furnitur	187,439.93	194,466.74	203,469.44	214,851.27	223,875.55
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin d	72,961.04	73,644.84	74,402.47	78,564.45	81,687.61

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,643.51	15,007.47	15,319.14	16,158.41	16,261.43
	1 Ketenagalistrikan	13,303.79	14,643.14	14,938.99	15,758.27	15,848.34
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	339.72	364.33	380.15	400.14	413.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,869.24	7,023.49	7,187.12	7,371.09	7,587.70
F	Konstruksi	1,480,726.46	1,576,671.34	1,709,440.93	1,815,540.82	1,881,193.79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,834,327.79	3,098,759.88	3,324,721.70	3,531,596.42	3,757,047.39
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	653,945.56	703,556.43	748,323.68	786,912.53	797,485.22
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	2,180,382.23	2,395,203.45	2,576,398.02	2,744,683.89	2,959,562.17
H	Transportasi dan Pergudangan	205,866.54	214,738.50	227,055.19	243,763.11	258,838.11
	1 Angkutan Rel	3,879.19	3,895.90	3,896.21	4,211.05	4,586.68
	2 Angkutan Darat	133,656.19	140,856.49	150,199.85	162,463.25	172,897.99
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	68,331.16	69,986.11	72,959.13	77,088.81	81,353.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144,758.81	162,255.90	169,054.53	179,138.54	189,796.54
	1 Penyediaan Akomodasi	512.23	540.65	553.56	586.73	625.05
	2 Penyediaan Makan Minum	144,246.58	161,715.25	168,500.97	178,551.81	189,171.49
J	Informasi dan Komunikasi	954,412.30	1,032,384.74	1,144,096.30	1,215,107.22	1,293,403.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	343,532.90	391,033.23	426,685.45	451,133.69	470,703.19
	1 Jasa Perantara Keuangan	83,296.08	91,271.54	101,656.73	108,073.86	114,987.28
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	71,144.90	81,358.04	95,217.77	97,950.03	102,757.90
	3 Jasa Keuangan Lainnya	188,817.20	218,086.35	229,477.07	244,757.40	252,594.49
	4 Jasa Penunjang Keuangan	274.72	317.30	333.88	352.40	363.52
L	Real Estate	328,765.24	344,557.30	362,708.03	387,235.16	409,798.90
M,N	Jasa Perusahaan	62,366.01	65,211.45	67,686.64	70,575.74	73,910.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666,619.60	685,471.53	693,264.05	695,816.45	726,662.85
P	Jasa Pendidikan	680,930.42	715,282.27	757,134.77	821,570.54	872,218.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,498.91	136,244.35	146,375.80	166,315.41	175,738.99
R,S,T,U	Jasa lainnya	263,082.12	275,911.72	286,973.89	301,472.69	315,083.72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17,093,902.35	18,054,455.60	18,967,279.93	19,920,156.47	20,925,474.26

Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015
(Juta Rp) Tanpa Subsektor Perikanan

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	6	7	8	9	10
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,247,429.60	5,450,520.98	5,521,389.63	5,637,821.31	5,841,606.29
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5,128,432.50	5,295,730.44	5,357,337.04	5,465,160.18	5,657,473.39
	a. Tanaman Pangan	1,453,455.80	1,521,309.30	1,529,592.00	1,549,284.70	1,626,313.50
	b. Tanaman Hortikultura	576,352.00	598,229.02	598,794.40	618,140.77	658,274.45
	c. Perkebunan	806,224.90	833,146.64	847,892.83	884,066.07	902,881.55
	d. Peternakan	2,219,110.80	2,266,066.19	2,301,553.14	2,329,891.51	2,384,080.10
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	73,289.00	76,979.29	79,504.67	83,777.13	85,923.79
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	118,997.10	154,790.54	164,052.59	172,661.13	184,132.90
B	Pertambangan dan Penggalian	800,767.90	811,034.85	842,883.46	872,503.63	898,494.95
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam	84,364.50	87,147.57	86,910.38	97,664.28	88,741.57
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	716,403.40	723,887.28	755,973.08	774,839.35	809,753.38
C	Industri Pengolahan	2,282,471.40	2,318,192.28	2,431,580.05	2,599,399.72	2,767,881.46
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	856,110.60	855,158.47	910,259.17	975,212.77	1,078,664.64
	3 Pengolahan Tembakau	642,371.40	659,411.13	676,902.35	733,781.24	770,742.92
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3,447.42	3,600.45	3,785.87	3,997.90	4,097.54
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2,370.37	2,457.12	2,564.10	2,707.27	2,757.16
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari	261,648.55	262,502.24	276,119.07	294,130.63	292,684.64
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi	34,442.77	34,878.38	35,067.91	35,296.79	36,686.02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8,527.42	9,103.86	9,800.03	10,452.90	10,854.42
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8,841.86	9,796.36	10,100.02	10,762.19	11,066.80
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	164,186.50	170,912.87	184,504.04	192,766.63	205,408.01
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan P	38,096.29	40,176.73	42,398.12	44,546.38	46,979.47
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	81.69	82.83	83.73	86.77	87.26
	14 Industri Alat Angkutan	1,945.56	2,000.26	2,123.73	2,242.53	2,289.42
	15 Industri Furnitur	187,439.93	194,466.74	203,469.44	214,851.27	223,875.55
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin d	72,961.04	73,644.84	74,402.47	78,564.45	81,687.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,643.51	15,007.47	15,319.14	16,158.41	16,261.43
	1 Ketenagalistrikan	13,303.79	14,643.14	14,938.99	15,758.27	15,848.34
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	339.72	364.33	380.15	400.14	413.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,869.24	7,023.49	7,187.12	7,371.09	7,587.70

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
F	Konstruksi	1,480,726.46	1,576,671.34	1,709,440.93	1,815,540.82	1,881,193.79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,834,327.79	3,098,759.88	3,324,721.70	3,531,596.42	3,757,047.39
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	653,945.56	703,556.43	748,323.68	786,912.53	797,485.22
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	2,180,382.23	2,395,203.45	2,576,398.02	2,744,683.89	2,959,562.17
H	Transportasi dan Pergudangan	205,866.54	214,738.50	227,055.19	243,763.11	258,838.11
	1 Angkutan Rel	3,879.19	3,895.90	3,896.21	4,211.05	4,586.68
	2 Angkutan Darat	133,656.19	140,856.49	150,199.85	162,463.25	172,897.99
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	68,331.16	69,986.11	72,959.13	77,088.81	81,353.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144,758.81	162,255.90	169,054.53	179,138.54	189,796.54
	1 Penyediaan Akomodasi	512.23	540.65	553.56	586.73	625.05
	2 Penyediaan Makan Minum	144,246.58	161,715.25	168,500.97	178,551.81	189,171.49
J	Informasi dan Komunikasi	954,412.30	1,032,384.74	1,144,096.30	1,215,107.22	1,293,403.42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	343,532.90	391,033.23	426,685.45	451,133.69	470,703.19
	1 Jasa Perantara Keuangan	83,296.08	91,271.54	101,656.73	108,073.86	114,987.28
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	71,144.90	81,358.04	95,217.77	97,950.03	102,757.90
	3 Jasa Keuangan Lainnya	188,817.20	218,086.35	229,477.07	244,757.40	252,594.49
	4 Jasa Penunjang Keuangan	274.72	317.30	333.88	352.40	363.52
L	Real Estate	328,765.24	344,557.30	362,708.03	387,235.16	409,798.90
M,N	Jasa Perusahaan	62,366.01	65,211.45	67,686.64	70,575.74	73,910.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666,619.60	685,471.53	693,264.05	695,816.45	726,662.85
P	Jasa Pendidikan	680,930.42	715,282.27	757,134.77	821,570.54	872,218.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,498.91	136,244.35	146,375.80	166,315.41	175,738.99
R,S,T,U	Jasa lainnya	263,082.12	275,911.72	286,973.89	301,472.69	315,083.72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16,442,068.75	17,300,301.28	18,133,556.68	19,012,519.95	19,956,227.24

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015 (%) Termasuk Subsektor Perikanan

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.00	35.08	35.25	35.87	36.05
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30.58	29.76	29.76	30.05	30.11
	a. Tanaman Pangan	8.74	8.74	8.60	8.59	8.84
	b. Tanaman Hortikultura	3.30	3.11	2.97	3.02	3.10
	c. Perkebunan	4.82	4.68	4.59	4.69	4.60
	d. Peternakan	13.29	12.79	13.17	13.30	13.12
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.43	0.44	0.44	0.45	0.46
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.72	1.04	0.99	1.07	1.10
	3 Perikanan	3.70	4.28	4.50	4.75	4.84
B	Pertambangan dan Penggalian	4.60	4.27	4.10	4.42	4.21
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.49	0.47	0.43	0.49	0.36
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4.11	3.80	3.67	3.93	3.85
C	Industri Pengolahan	13.59	12.95	12.82	12.75	12.83
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.27	4.97	4.84	4.83	5.04
	3 Pengolahan Tembakau	3.81	3.77	3.87	3.78	3.79
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.59	1.45	1.42	1.43	1.35
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.92	0.89	0.88	0.90	0.88
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14 Industri Alat Angkutan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	15 Industri Furnitur	1.03	0.94	0.92	0.96	0.94
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0.41	0.37	0.35	0.34	0.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
	1 Ketenagalistrikan	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
F	Konstruksi	8.67	8.89	8.96	9.13	8.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.47	17.06	17.20	16.73	16.96
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.83	3.88	4.08	3.90	3.72
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12.64	13.18	13.11	12.83	13.23
H	Transportasi dan Pergudangan	1.18	1.15	1.16	1.19	1.21
	1 Angkutan Rel	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	2 Angkutan Darat	0.74	0.72	0.72	0.75	0.76
	3 Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.82	0.87	0.85	0.86	0.87
	1 Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Penyediaan Makan Minum	0.82	0.86	0.85	0.85	0.87
J	Informasi dan Komunikasi	5.31	5.15	5.21	4.93	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.00	2.26	2.31	2.32	2.30
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.48	0.53	0.56	0.56	0.55
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.42	0.48	0.52	0.51	0.51
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1.09	1.25	1.23	1.25	1.23
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	1.89	1.83	1.81	1.74	1.79
M,N	Jasa Perusahaan	0.36	0.35	0.35	0.33	0.33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.85	3.84	3.64	3.32	3.25
P	Jasa Pendidikan	3.96	4.05	4.12	4.17	4.11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.71	0.74	0.75	0.77	0.76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.49	1.42	1.37	1.37	1.37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Lampiran 5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2015 (%) Tanpa Subsektor Perikanan

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.30	30.80	30.75	31.12	31.21
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30.58	29.76	29.76	30.05	30.11
	a. Tanaman Pangan	8.74	8.74	8.60	8.59	8.84
	b. Tanaman Hortikultura	3.30	3.11	2.97	3.02	3.10
	c. Perkebunan	4.82	4.68	4.59	4.69	4.60
	d. Peternakan	13.29	12.79	13.17	13.30	13.12
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.43	0.44	0.44	0.45	0.46
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.72	1.04	0.99	1.07	1.10
B	Pertambangan dan Penggalian	4.60	4.27	4.10	4.42	4.21
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.49	0.47	0.43	0.49	0.36
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4.11	3.80	3.67	3.93	3.85
C	Industri Pengolahan	13.59	12.95	12.82	12.75	12.83
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.27	4.97	4.84	4.83	5.04
	3 Pengolahan Tembakau	3.81	3.77	3.87	3.78	3.79
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.59	1.45	1.42	1.43	1.35
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.92	0.89	0.88	0.90	0.88
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14 Industri Alat Angkutan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	15 Industri Furnitur	1.03	0.94	0.92	0.96	0.94
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0.41	0.37	0.35	0.34	0.33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05
	1 Ketenagalistrikan	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	8.67	8.89	8.96	9.13	8.99

Kategori	Uraian		2011	2012	2013	2014	2015
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		16.47	17.06	17.20	16.73	16.96
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3.83	3.88	4.08	3.90	3.72
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12.64	13.18	13.11	12.83	13.23
H	Transportasi dan Pergudangan		1.18	1.15	1.16	1.19	1.21
	1	Angkutan Rel	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	2	Angkutan Darat	0.74	0.72	0.72	0.75	0.76
	3	Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-
	5	Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		0.82	0.87	0.85	0.86	0.87
	1	Penyediaan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Penyediaan Makan Minum	0.82	0.86	0.85	0.85	0.87
J	Informasi dan Komunikasi		5.31	5.15	5.21	4.93	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		2.00	2.26	2.31	2.32	2.30
	1	Jasa Perantara Keuangan	0.48	0.53	0.56	0.56	0.55
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	0.42	0.48	0.52	0.51	0.51
	3	Jasa Keuangan Lainnya	1.09	1.25	1.23	1.25	1.23
	4	Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate		1.89	1.83	1.81	1.74	1.79
M,N	Jasa Perusahaan		0.36	0.35	0.35	0.33	0.33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		3.85	3.84	3.64	3.32	3.25
P	Jasa Pendidikan		3.96	4.05	4.12	4.17	4.11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		0.71	0.74	0.75	0.77	0.76
R,S,T,U	Jasa lainnya		1.49	1.42	1.37	1.37	1.37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			96.30	95.72	95.50	95.25	95.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS			96.30	95.72	95.50	95.25	95.16

Lampiran 6. Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2015 (Milyar Rp)

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Seri 2010 (Milyar Rupiah)				
	Harga Konstan				
	2011	2012	2013	2014	2015
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	993,857.30	1,039,440.70	1,083,141.80	1,129,052.70	1,171,445.80
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	780,581.10	816,304.40	847,763.70	880,389.50	906,805.50
a. Tanaman Pangan	250,787.40	263,076.20	268,268.20	268,426.90	280,018.80
b. Tanaman Hortikultura	120,079.30	117,424.50	118,207.70	124,300.90	127,110.00
c. Tanaman Perkebunan	281,465.00	301,019.50	319,532.60	338,502.20	345,164.90
d. Peternakan	113,603.30	119,249.80	125,302.30	132,221.10	136,936.40
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14,646.10	15,534.40	16,452.90	16,938.40	17,575.40
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,731.00	58,872.00	59,228.80	59,573.50	60,623.50
3. Perikanan	154,545.20	164,264.30	176,149.30	189,089.70	204,016.80
B. Pertambangan dan Penggalian	748,956.30	771,561.60	791,054.40	794,489.50	767,327.20
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	335,737.10	323,632.40	313,328.10	307,161.70	307,325.80
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	199,244.00	230,589.20	247,594.60	251,073.60	232,725.30
3. Pertambangan Bijih Logam	95,413.70	91,614.50	98,608.60	98,257.90	87,702.90
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	118,561.50	125,725.50	131,523.10	137,996.30	139,573.20
C. Industri Pengolahan	1,607,452.00	1,697,787.20	1,771,961.90	1,854,256.70	1,934,533.20
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	233,051.90	227,456.10	221,449.90	216,750.80	214,312.00
Industri Pengolahan Non Migas	1,374,400.10	1,470,331.10	1,550,512.00	1,637,505.90	1,720,221.20
1. Industri Makanan dan Minuman	400,003.70	441,341.70	459,283.00	502,856.20	540,756.40
2. Industri Pengolahan Tembakau	67,096.80	73,011.40	72,814.00	78,878.70	83,798.70
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	102,561.10	108,753.60	115,913.10	117,723.40	112,078.90
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	21,852.30	20,665.30	21,745.70	22,967.70	23,879.20
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	55,230.90	54,786.90	58,180.60	61,742.50	60,735.40
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	70,631.60	68,590.40	68,229.40	70,670.10	70,556.80
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	124,230.70	140,101.80	147,248.60	153,191.90	164,843.00
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	68,152.60	73,307.40	71,945.70	72,777.30	76,442.10
9. Industri Barang Galian bukan Logam	54,909.80	59,252.40	61,228.70	62,706.80	66,485.20
10. Industri Logam Dasar	61,859.70	60,888.70	67,972.40	72,059.10	76,532.10
11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	142,245.00	158,803.50	173,452.40	178,544.20	192,528.00
12. Industri Mesin dan Perlengkapan	25,794.50	25,436.70	24,163.80	26,259.70	28,250.50
13. Industri Alat Angkutan	142,815.20	148,905.40	171,165.50	178,022.50	182,289.10
14. Industri Furnitur	22,061.80	21,588.50	22,375.40	23,179.90	24,377.40
15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	14,954.40	14,897.40	14,793.70	15,925.90	16,668.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	76,678.10	84,393.00	88,805.10	94,047.20	94,894.80
1. Ketenagalistrikan	63,384.50	70,826.50	75,050.70	79,581.50	81,407.00
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	13,293.60	13,566.50	13,754.40	14,465.70	13,487.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,125.10	6,329.80	6,539.90	6,882.50	7,369.00
F. Konstruksi	683,421.90	728,226.40	772,719.60	826,615.60	879,163.90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,013,199.60	1,067,911.50	1,119,272.10	1,177,297.50	1,207,164.50
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	190,877.70	203,430.90	218,291.10	229,228.40	229,967.50
PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2011	2012	2013	2014	2015

2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	822,321.90	864,480.60	900,981.00	948,069.10	977,197.00
H. Transportasi dan Pergudangan	265,774.00	284,662.60	304,506.20	326,933.00	348,855.90
1. Angkutan Rel	2,297.90	2,201.70	2,336.90	2,823.10	2,948.60
2. Angkutan Darat	145,018.60	155,851.80	167,559.50	180,367.40	192,631.00
3. Angkutan Laut	23,541.50	25,600.80	27,372.40	29,473.70	30,174.00
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	8,813.30	9,057.00	9,469.20	10,117.60	10,222.20
5. Angkutan Udara	43,917.40	47,030.30	49,263.20	52,255.10	57,671.80
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	42,185.30	44,921.00	48,505.00	51,896.10	55,208.30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,022.00	228,232.60	243,748.30	257,815.50	268,922.40
1. Penyediaan Akomodasi	39,784.90	43,567.40	47,699.60	51,426.70	54,340.30
2. Penyediaan Makan Minum	174,237.10	184,665.20	196,048.70	206,388.80	214,582.10
J. Informasi dan Komunikasi	281,693.80	316,278.70	349,150.10	384,475.60	421,769.80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	256,443.00	280,896.10	305,515.10	319,825.50	347,269.00
1. Jasa Perantara Keuangan	158,503.70	175,168.10	192,098.00	197,712.20	216,631.20
2. Asuransi dan Dana Pensiun	55,801.80	60,045.00	64,661.30	69,794.60	74,398.10
3. Jasa Keuangan Lainnya	35,860.20	38,867.70	41,371.70	44,464.70	48,013.80
4. Jasa Penunjang Keuangan	6,277.30	6,815.30	7,384.10	7,854.00	8,225.90
L. Real Estate	213,441.40	229,254.20	244,237.50	256,440.20	266,979.60
M,N. Jasa Perusahaan	108,239.30	116,293.30	125,490.70	137,795.30	148,395.50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	276,336.80	282,235.30	289,448.90	296,329.70	310,054.60
P. Jasa Pendidikan	215,029.10	232,704.30	250,016.20	263,685.00	283,020.10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72,592.10	78,380.10	84,621.40	91,357.10	97,465.80
R,S,T,U. Jasa lainnya	109,372.40	115,675.40	123,083.10	134,070.10	144,904.20
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	7,142,634.20	7,560,262.80	7,953,312.30	8,351,368.70	8,699,535.30
B. PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	145,001.10	166,820.60	203,185.50	213,497.90	282,981.80
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	7,287,635.30	7,727,083.40	8,156,497.80	8,564,866.60	8,982,517.10